



**DAMPAK PROGRAM REHABILITASI LAHAN KRITIS
PADA MASYARAKAT DI KAWASAN
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(Studi Kasus di Desa Sanenrejo Kab. Jember)**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Agribisnis (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pertanian

SKRIPSI

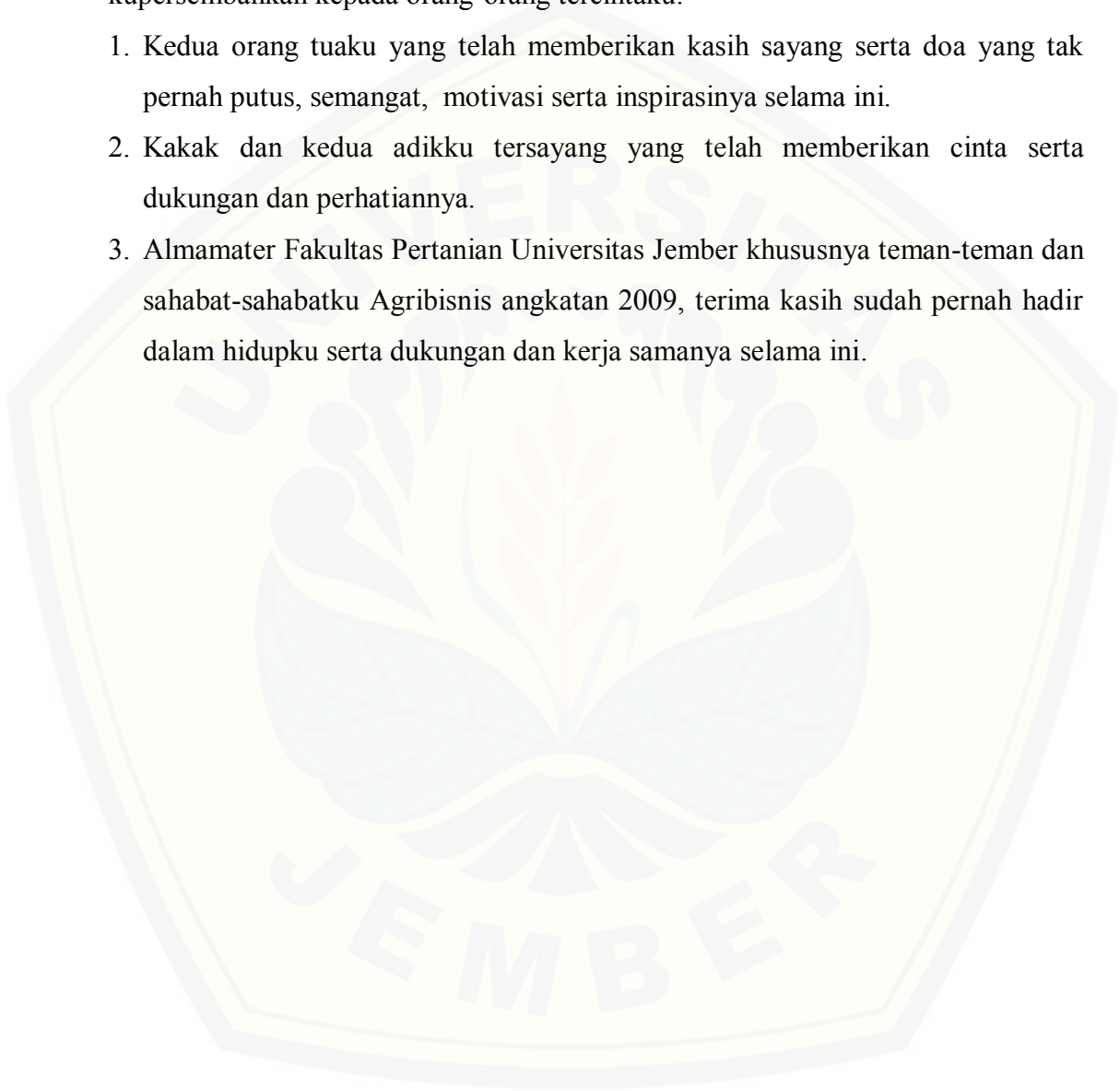
Oleh:
Andika Akvan Prawasmono
NIM. 091510601064

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, skripsi ini ingin kupersembahkan kepada orang-orang tercintaku:

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan kasih sayang serta doa yang tak pernah putus, semangat, motivasi serta inspirasinya selama ini.
2. Kakak dan kedua adikku tersayang yang telah memberikan cinta serta dukungan dan perhatiannya.
3. Almamater Fakultas Pertanian Universitas Jember khususnya teman-teman dan sahabat-sahabatku Agribisnis angkatan 2009, terima kasih sudah pernah hadir dalam hidupku serta dukungan dan kerja samanya selama ini.



MOTTO

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan”

(Sayidina Ali Bin Abi Thalib)

“Jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi carilah kawan yang memaksa Anda terus berkembang”

(Thomas J. Watson)

Jangan sia-siakan kepercayaan orang lain yang sudah percaya terhadap kita

(Lis Hardiyanto)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Akvan Prawasmono

NIM : 091510601064

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri (*Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kab. Jember*) ”
adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2016

Yang Menyatakan,

**Andika Akvan P.
NIM. 091510601064**

SKRIPSI

**DAMPAK PROGRAM REHABILITASI LAHAN KRITIS
PADA MASYARAKAT DI KAWASAN
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(Studi Kasus di Desa Sanenrejo Kab. Jember)**

Oleh:

**Andika Akvan Prawasmono
NIM. 091510601064**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Aryo Fajar Sunartomo, SP. M.Si.
NIP. 197401161999031001

Dosen Pembimbing Anggota : Mustapit, SP.,M.Si.
NIP. 197708162005011001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kab. Jember)**”, telah diuji dan disahkan oleh Fakultas pertanian pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Juni 2016

Tempat : Fakultas Pertanian Universitas Jember

Tim Penguji

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Arvo Fajar Sunartomo, SP., M.Si.
NIP. 197401161999031001

Mustapit, SP., M.Si.
NIP 197708162005011001

Penguji,

M. Rondhi, S.P., MP., Ph.D.
NIP. 197707062008011012

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ir. Jani Januar, MT.
NIP. 195901021988031002

RINGKASAN

Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri (*Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kab. Jember*).

Andika Akvan P. 091510601085, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember.

Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem karena hubungan antara masyarakat, tumbuhan pembentuk hutan dengan binatang liar dan alam lingkungannya sangat erat. Manusia yang memanfaatkan atau mengelola sistem tersebut harus mempunyai pengetahuan ekologi hutan dan mau menerapkan dalam setiap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan, sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan kelestariannya dapat terjamin. Ada 3 macam jenis hutan menurut fungsinya yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Rehabilitasi hutan di TNMB merupakan upaya untuk memulihkan fungsi dan kondisi kawasan yang rusak melalui kegiatan penanaman, pengkayaan jenis dan pemeliharaan dengan tumbuhan asli setempat, serta mengurangi atau menghentikan perambahan hutan pada zona rimba dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan sebagai pelaku kegiatan rehabilitasi. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan rehabilitasi kawasan adalah mempercepat penutupan kawasan yang terbuka oleh vegetasi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di sekitar daerah penyangga (Balai Taman Nasional Meru Betiri, 2013).

Keinginan Pihak TNMB untuk melakukan kerjasama dalam mengelola lahan rehabilitasi melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*). *Stakeholders* berkewajiban membantu dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Balai TNMB dalam setiap kegiatan rehabilitasi. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi melibatkan masyarakat daerah penyangga di sekitar kawasan TNMB. Daerah penyangga di sekitar Taman Nasional Meru Betiri salah

satunya yaitu Desa Sanenrejo. Program rehabilitasi dilaksanakan pada tahun 1999 dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan untuk melakukan penanaman kembali secara swadaya dengan tujuan awal supaya kawasan yang terbuka dapat segera dihijaukan kembali. Masyarakat Desa Sanenrejo sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Bagi petani yang memiliki lahan sawah, pendapatan yang diperoleh tergantung dari hasil panen tanaman budidaya. Sedangkan, masyarakat yang tidak memiliki sawah memilih bekerja sebagai buruh tani. Namun seiring dengan diadakannya program rehabilitasi, masyarakat yang tidak memiliki sawah akan diberi lahan garapan oleh pihak Balai TNMB untuk dikelola di lahan rehabilitasi. Kemitraan yang dilakukan oleh Pihak Balai TNMB dengan masyarakat Desa Sanenrejo dilandasi dengan perjanjian tertulis atau nota kesepahaman yang telah disepakati secara bersama-sama. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lahan rehabilitasi serta kekurangpahaman masyarakat tentang tujuan diadakannya kegiatan rehabilitasi diduga menjadi salah satu penghambat dari keberhasilan program rehabilitasi TNMB

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Bagaimana dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, (2) Bagaimana tingkat keberhasilan Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Metode penentuan daerah penelitian dilakukan metode evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) serta tabulasi dan Analisis *Scoring*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Dampak sosial Masyarakat Desa Sanenrejo dengan adanya Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat dikatakan cukup baik, dimana pada indikator komitmen masyarakat seluruh atributnya berada pada frekuensi skor 3 (tiga) yang memiliki nilai “Cukup/ Cukup Baik”. Pada indikator interaksi masyarakat, atribut gotong royong berada pada frekuensi skor 3 (tiga) yang memiliki nilai “Cukup/ Cukup Baik”, sedangkan atribut hubungan masyarakat dengan pihak TNMB dan keharmonisan hubungan antar masyarakat Desa Sanenrejo berada frekuensi skor 4 (empat) yang memiliki nilai “Baik”. (2) Dampak ekonomi Masyarakat Desa Sanenrejo dengan adanya Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman

Nasional Meru Betiri dapat dikatakan cukup baik. Dimana pada indikator pendapatan, peningkatan pendapatan Masyarakat Desa Sanenrejo berada pada frekuensi skor 4 (empat) yang memiliki nilai “Baik”, sedangkan tingkat konsumsi Masyarakat Desa Sanenrejo berada pada frekuensi skor 3 (tiga) yang memiliki nilai “cukup/ Cukup Baik”. Pada indikator lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja dalam program rehabilitasi berada pada frekuensi skor 3 (tiga) yang memiliki nilai “Cukup/ Cukup Baik”, sedangkan peluang lapangan kerja baru berada pada frekuensi skor 4 (empat) yang memiliki nilai “Baik, (3) Tingkat keberhasilan Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri melalui evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) secara keseluruhan berhasil. Pada masing-masing tahapan, evaluasi konteks (*context*), evaluasi masukan (*input*), evaluasi proses (*process*), evaluasi produk (*product*) berada pada frekuensi skor 3 (tiga) yang memiliki nilai “Cukup/ Cukup Baik”.

SUMMARY

Impact of Critical Land Rehabilitation Program In Public On Meru National Park Betiri Region (Case Study Sanenrejo In the village of the district. Jember).

Andika Akvan P. 091510601085, Agribusiness Studies Program, Faculty of Agriculture, University of Jember.

Forest is seen as an ecosystem, because the relationship between people, plants forming the forest with wild animals and the natural world very closely. Humans are using or managing such systems must have knowledge of forest ecology and apply in every activity of forest use and management, so that the forest can be utilized optimally and sustainability can be assured. There are 3 types of forest according to its function of production forests, protected forests and conservation forests. Production forests are forest areas that have the principal function of producing forest products. Protected forest is a forest containing a basic function as the protection of life support systems to regulate the water system, prevent floods, control erosion, prevent sea water intrusion and maintaining soil fertility.

TNMB forest rehabilitation in an attempt to restore the function and condition of the damaged areas through planting activities, enrichment and maintenance type with native plants, as well as reducing or stopping encroachment on the forest zone by involving the community in the surrounding area as the perpetrators of rehabilitation activities. The aim of the rehabilitation of the region is accelerating the closure of the open area by the vegetation and provide jobs to communities around the buffer zone (Betiri Meru National Park Office, 2013).

TNMB Parties desire to cooperate in managing land rehabilitation involves various parties (stakeholders). Stakeholders obliged to assist and support the efforts undertaken by the Center for TNMB in any rehabilitation. The relevant parties involved in rehabilitation activities involving local communities in the surrounding area TNMB buffer. Buffer zones around Meru National Park Betiri one of which is the village Sanenrejo. The rehabilitation program conducted in

1999 involving the community around the area for replanting independently with an early goal so that the open area immediately revegetated. Village Community Sanenrejo mostly work as farmers and farm workers. For farmers who have wetland, the income depends on crops cultivation. Meanwhile, people who do not have the fields they work as farm laborers. But along with the holding of the rehabilitation program, people who do not have the rice fields of arable land will be given by the Hall TNMB to be managed on rehabilitated land. Partnerships undertaken by the Party Central Village community Sanenrejo TNMB with fortified by a written agreement or memorandum of understanding agreed upon jointly. Lack of public awareness in managing land rehabilitation and the public lack of understanding about the purpose of the rehabilitation is thought to be one of the obstacles to the success of the rehabilitation program TNMB

This study aims to (1) determine the pattern of arabica coffee growers partnership with Perum Perhutani, (2) know the difference arabica coffee farmers' income partnering and partnering with Perum Perhutani and (3) determine what factors underlying the decision of arabica coffee growers partnering and partnering. Method of determining the area of research is done intentionally (purposive method). The method used in this research is descriptive, comparative and analytical. Sampling method in this study with the technique slovin and proportioned stratified random sampling. Analysis of the data used in this research is the analysis of income, -t Test, test and logit regression models. The results showed that (1) a partnership of arabica coffee farmers with Perum Perhutani is a core-plasma, (2) income arabica coffee farmers who partnered lower than the coffee farmers who are not partnered with Perum Perhutani. The average income earned arabica coffee farmers who partnered Rp. 15,780,684.54, the value is lower than the average income of farmers who are not partnered Rp. 32,552,069.69 and (3) the factors that underlie decision arabica coffee growers partnering and partnering with Perum Perhutani is age, education, income and expenses.

This study aims to (1) What is the impact of Critical Land Rehabilitation Program on the socioeconomic conditions of society in Meru National Park Area

Betiri, (2) How is the success rate of Critical Land Rehabilitation Program at the National Park Meru Betiri. The method of determining the area of research conducted evaluation method CIPP (Context, Input, Process, Product) and the tabulation and analysis of Scoring.

The results show that (1) The social impact of the Villagers Sanenrejo with their Program Critical Land Rehabilitation in Region Betiri Meru National Park can be quite good, with the indicator of the community's commitment throughout its attributes at a frequency score of 3 (three) which has a value of "Enough / Pretty good". In indicator of community interaction, the attributes of mutual cooperation at a frequency score of 3 (three) which has a value of "Pretty / Pretty Good", while the attributes of public relations with the national park and harmonious ties between the villagers Sanenrejo are frequency score of 4 (four) having a value "Good". (2) The economic impact of the Villagers Sanenrejo with their Critical Land Rehabilitation Program at the National Park Meru Betiri can be quite good. Where the indicators of income, increased income Sanenrejo Village Community at a frequency score of 4 (four) which has a value of "Good", while the consumption level of Rural Community Sanenrejo at a frequency score of 3 (three) which has a value of "pretty / Pretty Good". In indicator of employment, employment in the rehabilitation program at a frequency score of 3 (three) which has a value of "Pretty / Pretty Good", while the chances of new jobs at a frequency score of 4 (four) which has a value of "Good, (3) The success rate of Critical Land Rehabilitation Program at the National Park Meru Betiri through evaluation of CIPP (Context, input, Process, Product) overall success. At each stage, the evaluation context (context), the evaluation of the input (input), the evaluation process (process), evaluation of the product (product) at a frequency score of 3 (three) which has a value of "Pretty / Pretty Good".

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji dan syukur saya tujukan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tertulis yang berjudul "Pola Kemitraan Petani Kopi Arabika Dengan Perum Perhutani Serta Perbedaan Pendapatan Petani Kopi Di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo" dengan sebaik-baiknya. Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan karya ilmiah tertulis ini, yaitu:

1. Dr. Ir. Jani Januar, MT selaku dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember.
2. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Dr. Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M. Rur. M. yang telah memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah tertulis ini.
3. Bapak Aryo Fajar Sunartomo, SP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Mustapit, SP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota dan Bapak M. Rondhi, S.P., MP., Ph.D. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Luh Putu Suciati, SP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Agribisnis dan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan kritik kepada penulis.
6. Ibunda tercinta dan Ayahanda tersayang yang telah memberikan seluruh doa, restu, pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan semangat dalam kondisi senang maupun duka serta menjadi inspirasi. Saudaraku Yuli Rahayu, Rofi

Hoffle, Palomitha Erika Putri yang tak henti-hentinya memberikan semangat selama ini.

7. Bapak yang memberikan dukungan dan bantuan selama kegiatan penelitian di Desa Snenrejo.
8. Teman, sahabat, dan juga sekaligus saudara-saudaraku “Ngampus”, Begok, Dahok, Beny, Erik, Cahyo, Fafan, Ibrahim, Titto, Anas, Ariel, Iffa, nisa Atin, Fransiska Ade Irma, Acclivity Noveltine Libertyca, Adit, Helis, Bagus, , Yoga, Dean, Reza, Herdian, yang selalu sabar mendampingi serta memberikan semangat dalam mengerjakan karya tulis ini. Terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayangmu.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 Program Studi Agribisnis dan almamaterku “HIMASETA UNEJ” yang bersama kita saling menguatkan semangat selama perkuliahan dan penyelesaian penelitian.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang selalu memberikan semangat selama studi sampai selesai penulisan skripsi.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 30 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Kegunaan.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Teori Perubahan Sosial	13
2.2.2 Konsep Dampak Perubahan Sosial.....	14

2.2.3 Status SosialEkonomi	15
2.2.4 RehabilitasiLahan	16
2.2.5 Program RehabilitasiLahanKritis di TNMB	17
2.3 KerangkaPemikiran	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	30
3.1 Penentuan Daerah Penelitian.....	30
3.2 MetodePenelitian	30
3.3 MetodePengambilanSampel.....	30
3.4 MetodePengumpulan Data	31
3.5 MetodeAnalisis Data	31
3.6 DefinisiOperasional	36
BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	39
4.1 KeadaanUmumLokasiPenelitian.....	39
4.1.1 LetakGeografisdanTopografi	39
4.1.2 KeadaanIklimDesaSanenrejo.....	40
4.1.3 TopografiDesaSanenrejo.....	40
4.2 SumberDayaManusia	41
4.2.1 PotensiSumberDayaManusia.....	41
4.2.2 Agama danKepercayaan.....	42
4.2.3 RekapitulasiUsiaPendudukDesaSanenrejo.....	42
4.2.4 Tingkat Pendidikan Desa Sanenrejo.....	43
4.2.5 Mata PencaharianPokokDesaSanenrejo.....	44
4.3 KeadaanPemerintahanDesaSanenrejo	45
4.3.1 Lembaga Pemerintahan Desa Sanenrejo.....	45
4.4Taman NasionalMeruBetiri (TNMB)	47
4.5 ZonasiKawasanTaman NasionalMeruBetiri	50

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.....	52
5.2 Tingkat Keberhasilan Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.....	65
BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87
KUISIONER	93
DOKUMENTASI.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.1	Hasil Rekapitulasi Jumlah Skor Pengambilan Data, dan Interpretasi Pada Tahapan <i>Context</i>	11
2.2	Hasil Rekapitulasi Jumlah Skor Pengambilan Data, dan Interpretasi Pada Tahapan <i>Input</i>	11
2.3	Hasil Rekapitulasi Jumlah Skor Pengambilan Data, dan Interpretasi Pada Tahapan <i>Process</i>	12
2.4	Hasil Rekapitulasi Jumlah Skor Pengambilan Data, dan Interpretasi Pada Tahapan <i>Product</i>	12
3.1	Atribut Komitmen Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	32
3.2	Atribut Interaksi Masyarakat Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	32
3.3	Atribut Pendapatan Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	32
3.4	Atribut Lapangan Kerja Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	33
3.5	Atribut Evaluasi <i>Context</i> Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	33
3.6	Atribut Evaluasi <i>Input/</i> Masukan Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	34
3.7	Atribut Evaluasi <i>Process</i> Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	34
3.8	Atribut Evaluasi <i>Product</i> Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	35
4.1	Batas-batas Desa Sanenrejo	39
4.2	Luas Wilayah Desa Sanenrejo Menurut Penggunaannya	40

4.3	Keadaan Iklim Desa Sanenrejo	40
4.4	Topografi Desa Curahnongko	41
4.6	Jumlah Penduduk Desa Sanenrejo	41
4.7	Agama Dan Kepercayaan Penduduk Desa Sanenrejo	42
4.8	Rekapitulasi Usia Penduduk Desa Sanenrejo	42
4.9	Tingkat Pendidikan Desa Sanenrejo	43
4.10	Mata Pencaharian Pokok Desa Sanenrejo	45
4.11	Lembaga Pemerintahan Desa Sanenrejo	46
5.1	Hasil Perhitungan Indikator Komitmen Masyarakat Desa Sanenrejo	53
5.2	Dalam Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di TNMB	57
5.3	Hasil Perhitungan Indikator Interaksi Yang Timbul di Masyarakat	60
5.4	Desa Sanenrejo Dalam Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di TNMB	63
5.5	Hasil Perhitungan Indikator Pendapatan Masyarakat Desa Sanenrejo Dengan Adanya Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di TNMB	67
5.6	Hasil Perhitungan Indikator Lapangan Kerja di Desa Sanenrejo Dengan Adanya Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di TNMB	72
5.7	Hasil Perhitungan Evaluasi Konteks (<i>Context</i>) Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kawasan TNMB Pada Masyarakat Desa Sanenrejo	76
5.8	Hasil Perhitungan Evaluasi Masukan (<i>Input</i>) Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kawasan TNMB Pada Masyarakat Desa Sanenrejo	79
	Hasil Perhitungan Evaluasi Proses (<i>Process</i>) Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kawasan TNMB Pada Masyarakat Desa Sanenrejo	
	Hasil Perhitungan Evaluasi Produk (<i>Product</i>) Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kawasan TNMB Pada Masyarakat	

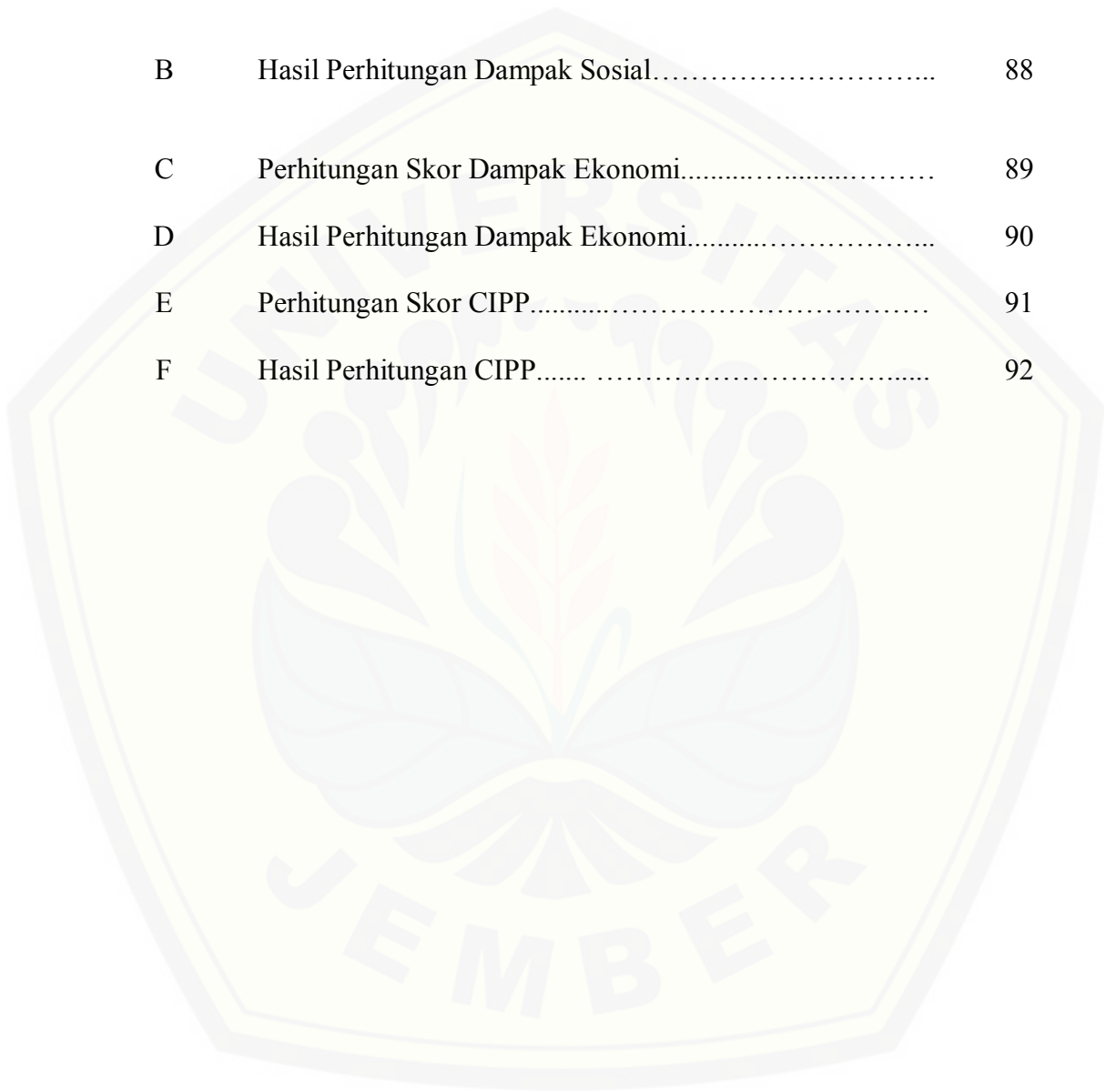
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.1	Peta Zonasi Kawasan Nasional Meru Betiri.....	Taman 3
2.1	Skema Kerangka Pemikiran.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
A	Perhitungan Skor Dampak Sosial	87
B	Hasil Perhitungan Dampak Sosial.....	88
C	Perhitungan Skor Dampak Ekonomi.....	89
D	Hasil Perhitungan Dampak Ekonomi.....	90
E	Perhitungan Skor CIPP.....	91
F	Hasil Perhitungan CIPP.....	92





**DAMPAK PROGRAM REHABILITASI LAHAN KRITIS
PADA MASYARAKAT DI KAWASAN
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(Studi Kasus di Desa Sanenrejo Kab. Jember)**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
tugas akhir pada Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Jember

Oleh:

**Andika Akvan Prawasmono
NIM. 091510601064**

**DPU: Aryo Fajar Sunartomo, SP. M.Si.
DPA: Mustapit, SP.,M.Si.**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem karena hubungan antara masyarakat, tumbuhan pembentuk hutan dengan binatang liar dan alam lingkungannya sangat erat. Manusia yang memanfaatkan atau mengelola sistem tersebut harus mempunyai pengetahuan ekologi hutan dan mau menerapkan dalam setiap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan, sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan kelestariannya dapat terjamin. Ada 3 macam jenis hutan menurut fungsinya yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Menurut Indriyanto (2008), hutan konservasi adalah salah satu hutan dengan kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU No.41 Tahun 1999). Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan hutan buru. Hutan konservasi sebagai salah satu kawasan lindung yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan sumber daya alam hayati sebagian besarnya juga sudah mengalami kerusakan. Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) merupakan salah satu hutan konservasi yang ada di Indonesia yang terletak di daerah Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Taman Nasional Meru Betiri sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli keberadaannya saat ini telah mengalami kelangkaan. Kelangkaan ini disebabkan karena sumber daya hutan di Taman Nasional Meru Betiri yang terus mengalami berbagai tekanan yang sangat luar biasa. Gangguan dan ancaman terhadap Taman Nasional Meru Betiri sebagai kawasan pelestarian alam semakin meningkat, hal ini disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa sumber daya hutan sebagai ladang tidak bertuan yang setiap orang berhak untuk

memanfaatkannya. Kebutuhan penduduk di sekitar kawasan hutan yang semakin kompleks membuat masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan secara berlebihan.

Menurut Tiorita (2012), kerusakan hutan yang terjadi disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat, ketergantungan masyarakat yang tinggal disekitar hutan terhadap kawasan hutan, penebangan legal yang berlebihan dan penebangan illegal, meningkatnya kenaikan jumlah penduduk, kurangnya lahan sebagai tempat tinggal, masyarakat belum mengetahui secara benar tentang fungsi dan manfaat hutan, perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian, kawasan pertambangan dan perkebunan serta bencana alam yang secara tidak langsung menyebabkan fungsi hutan hilang. Taman Nasional Meru Betiri telah mengalami kerusakan karena tekanan dari luar, hal ini memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar TNMB.

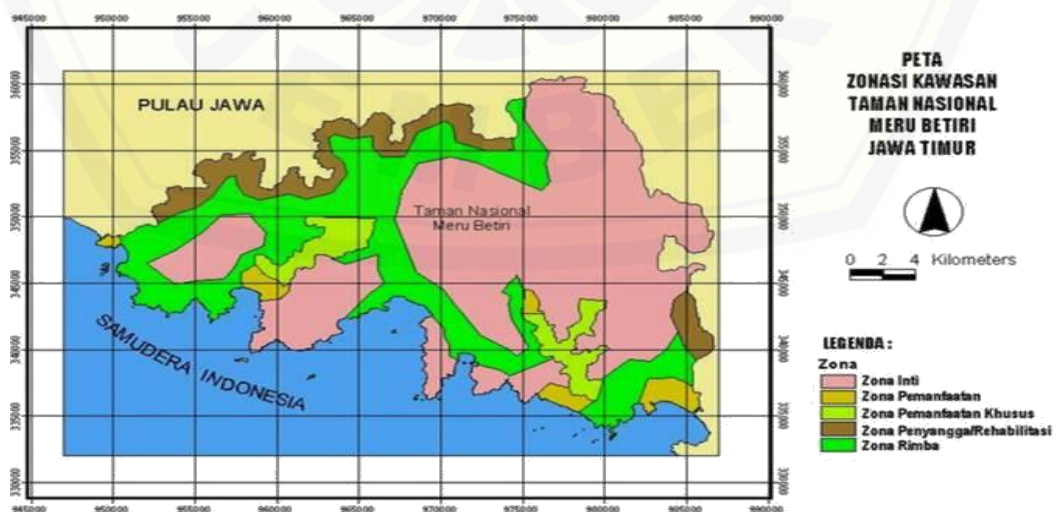
Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan fungsi dan kondisi kawasan yang telah rusak melalui kegiatan penanaman, pengayaan jenis dan pemeliharaan dengan tumbuhan asli setempat. Penanaman tanaman keras atau tanaman pokok selain berfungsi untuk mengembalikan kondisi hutan yang telah gundul, tetapi juga diharapkan dapat dijadikan sumber pendapatan bagi masyarakat di masa yang akan datang melalui hasil buahnya. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tersebut melibatkan masyarakat dan berbagai *stakeholder* lainnya yang secara bersama-sama mengelola lahan rehabilitasi (Purwaningsih, 2006).

Pada umumnya masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional mempunyai kebiasaan mengambil tumbuhan dan satwa liar yang berada di dalam kawasan Taman Nasional. Kebiasaan masyarakat tersebut jelas melanggar UndangUndang. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut antara lain perlu memberikan pelatihan pembudidayaan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang memberikan nilai ekonomis pada masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan kerjasama antara pihak Pengelola Taman Nasional dengan pihak perguruan tinggi serta pihak lain terutama dalam hal dukungan dana dari pemerintah, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar Taman Nasional maupun bagi Pengelola Taman Nasional.

Kegiatan masyarakat yang semula terbiasa dengan mengambil hasil hutan dari kawasan Taman Nasional dapat beralih profesi. Sehingga volume untuk masuk ke Taman Nasional jadi berkurang.

Kondisi Kawasan penyangga yang telah direhabilitasi oleh masyarakat sekitar kawasan dengan tanaman campuran atau lebih diarahkan ke *Agroforestry*. Masyarakat telah melakukan rehabilitasi lahan dengan memperhatikan konservasi tanah walaupun belum sempurna, masyarakat telah membuat teras-teras untuk penanaman tanaman semusimnya. Hal ini terlihat bahwa sudah ada kegiatan rehabilitasi lahan dengan menanam berbagai tanaman, seperti tanaman semusim (kacang tanah, singkong, kacang panjang dan cabe), juga tanaman kayu-kayuan seperti (nangka, pakem/ kluwak, pete) Penanaman kayu-kayuan ini adalah untuk memenuhi aturan Taman Nasional dengan catatan boleh mengambil buahnya tetapi dilarang menebang pohonnya, demi tercapainya tujuan program rehabilitasi di Zona Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri untuk kelestarian hutan dan perbaikan lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional sejahtera (Subaktini, 2006).

Taman Nasional Meru Betiri membuat zona rehabilitasi yang rencananya akan dilakukan program rehabilitasi. Hal ini didukung dengan pernyataan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.101/IV-SET/2011 tanggal 20 Mei 2011 menyatakan bahwa luas Zona Rehabilitasi adalah 2.733,5 Ha.



Gambar 1.1 Peta Zonasi Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

Upaya pengelola Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) untuk mencapai suatu keberhasilan program Rehabilitasi di kawasan penyangga melalui tahapan-tahapan, seperti sosialisai dengan masyarakat sekitar taman nasional dalam membuat aturan-aturan tentang penggunaan lahan di taman nasional. Dalam hal ini pihak pengelola taman nasional bersama masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sekitar taman nasional membuat draf aturan-aturan (MOU) yang harus disepakati bersama. Setelah aturan disepakati bersama, disosialisasikan lagi ke masyarakat di kawasan penyangga, masing-masing kepala keluarga mendapatkan lahan garapan seluas 0,25 Ha, setelah lima tahun wajib mengajukan ijin lagi. Setiap dua tahun diadakan evaluasi terhadap lahan garapan apakah masyarakat telah melakukan seperti pada perjanjian, apabila ada masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan seperti dalam perjanjian akan diberi sanksi bahkan bisa dicabut ijinnya.

Rehabilitasi hutan di TNMB merupakan upaya untuk memulihkan fungsi dan kondisi kawasan yang rusak melalui kegiatan penanaman, pengkayaan jenis dan pemeliharaan dengan tumbuhan asli setempat, serta mengurangi atau menghentikan perambahan hutan pada zona rimba dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan sebagai pelaku kegiatan rehabilitasi. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan rehabilitasi kawasan adalah mempercepat penutupan kawasan yang terbuka oleh vegetasi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di sekitar daerah penyangga (Balai Taman Nasional Meru Betiri, 2013).

Keinginan Pihak TNMB untuk melakukan kerjasama dalam mengelola lahan rehabilitasi melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*). *Stakeholders* berkewajiban membantu dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Balai TNMB dalam setiap kegiatan rehabilitasi. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi melibatkan masyarakat daerah penyangga di sekitar kawasan TNMB. Daerah penyangga di sekitar Taman Nasional Meru Betiri salah satunya yaitu Desa Sanenrejo. Program rehabilitasi dilaksanakan pada tahun 1999 dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan untuk melakukan penanaman kembali secara swadaya dengan tujuan awal supaya kawasan yang terbuka dapat segera dihijaukan kembali.

Masyarakat Desa Sanenrejo sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Bagi petani yang memiliki lahan sawah, pendapatan yang diperoleh tergantung dari hasil panen tanaman budidaya. Sedangkan, masyarakat yang tidak memiliki sawah memilih bekerja sebagai buruh tani. Namun seiring dengan diadakannya program rehabilitasi, masyarakat yang tidak memiliki sawah akan diberi lahan garapan oleh pihak Balai TNMB untuk dikelola di lahan rehabilitasi. Kemitraan yang dilakukan oleh Pihak Balai TNMB dengan masyarakat Desa Sanenrejo dilandasi dengan perjanjian tertulis atau nota kesepahaman yang telah disepakati secara bersama-sama. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lahan rehabilitasi serta kekurangpahaman masyarakat tentang tujuan diadakannya kegiatan rehabilitasi diduga menjadi salah satu penghambat dari keberhasilan program rehabilitasi TNMB.

Ditinjau dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melihat dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis pada masyarakat dikawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Peneliti ingin mengkaji dampak dari adanya program tersebut terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sanenrejo yang berada disekitar kawasan taman nasional, serta tingkat keberhasilan Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri tersebut. Harapan yang diinginkan apabila program rehabilitasi ini berhasil, kesejahteraan masyarakat terutama Masyarakat Desa Sanenrejo dan kelestarian Kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) dapat tercapai.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak Program Rehabilitasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan guna menjaga kelestarian hutan.
2. Sebagai bahan informasi bagi Taman Nasional Meru Betiri mengenai upaya rehabilitasi yang berkelanjutan di masa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Auliyani, Boedi dan Kismartini (2013), dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Rehabilitasi Mangrove Terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang”. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rembang meliputi Desa Tunggulsari (Kecamatan Kaliori), Desa Pasarbanggi (Kecamatan Rembang), dan Desa Dasun (Kecamatan Lasem). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan bahwa mangrove di Kabupaten Rembang terpusat di 3 (tiga) lokasi tersebut. Data kualitatif yang dikoleksi adalah data primer yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitarnya, dengan variabelnya berupa perubahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat pesisir sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas rehabilitasi mangrove. Fenomena aspek sosial yang diteliti berupa komitmen masyarakat dalam melestarikan mangrove, sedangkan tolak ukur yang digunakan dalam aspek ekonomi adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk melengkapi penelitian ini, juga dilakukan studi pustaka sebagai data sekunder melalui penelusuran kepustakaan berupa dokumen tertulis, termasuk sumber tertulis dari laporan resmi, buku harian seseorang, dan catatan program.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa rehabilitasi mangrove di Kabupaten Rembang memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, berupa munculnya komitmen bersama dari masyarakat dalam pelestarian mangrove, serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan mangrove secara ekologis (sebagai pelindung tambak) dan ekonomis (pemanfaatan biota perairannya).

Menurut Jurianto (2013), dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Dan Budaya Akibat Perubahan Mata Pencaharian Dari Nelayan Ke Penambang (Studi Kasus di Gunung Tumpang Pitu Dusun Pancer Desa Sumberagung Pesanggaran Banyuwangi). Dampak yang ditimbulkan dari perubahan mata pencaharian Masyarakat Dusun Pancer Desa Sumberagung dapat

dilakukan dengan pendekatan dengan menggunakan indikator-indikator dampak sosial, ekonomi dan budaya. Indikator dampak sosial terdiri dari: (1) Konflik; (2) Perilaku gotong-royong; (3) Tingkat sumbangan; dan (4) interaksi sosial. Indikator sosial yang digunakan adalah konflik, perilaku gotong royong, tingkat sumbangan dan interaksi sosial. Konflik digunakan untuk mengetahui apakah adanya pertambangan memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Perilaku gotong royong digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya pertambangan. Tingkat sumbangan digunakan untuk mengetahui apakah perubahan mata pencaharian mampu meningkatkan tingkat sumbangan masyarakat, sedangkan interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial.

Indikator dampak ekonomi yang digunakan antara lain: (1) Penyerapan TK (Tenaga Kerja) lokal; (2) Tingkat konsumsi masyarakat; (3) Pendapatan perbulan masyarakat; dan (4) Peluang pekerjaan lapangan baru. Penyerapan tenaga kerja lokal akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang nantinya juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat digunakan untuk mengetahui apakah setelah adanya pertambangan mengalami peningkatan atau tidak. Peluang lapangan pekerjaan baru ini berkaitan dengan adanya lokasi pertambangan. Apakah pertambangan tersebut dapat menciptakan peluang bagi masyarakat Dusun Pancer Desa Sumberagung, misalnya membuka toko konsumsi atau juga warung nasi dan sebagainya.

Menurut Haqqe N. H. (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Modal Sosial Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus di Desa Curahnongko Resort Andongrejo Jember)”. Karakteristik masyarakat Desa Curahnongko pada kegiatan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri meliputi mata pencaharian yang sebagian besar adalah petani, status kepemilikan lahan adalah milik Negara yang dikelola oleh petani mitra rehabilitasi, tingkat pendidikan petani mitra rehabilitasi tergolong rendah yaitu tidak tamat SD, serta tamatan SD dan SMP, pendapatan petani mitra rehabilitasi bergantung pada hasil panen dari usahatani tanaman musiman maupun tanaman pokok di lahan rehabilitasi. Unsur-unsur modal sosial meliputi kepercayaan,

norma sosial, nilai sosial, jaringan sosial, dan partisipasi. Kepercayaan dalam kegiatan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri berupa kepercayaan yang tercipta antar *stakeholders* dalam menjaga lahan hutan, serta sikap saling percaya dalam kerjasama yang tercipta pada kegiatan rehabilitasi. Norma sosial dalam kegiatan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri berupa norma hukum yang menjadi aturan-aturan yang mengikat masyarakat sekitar untuk tetap menjaga serta melestarikan hutan dan lahan rehabilitasi.

Nilai sosial dapat dilihat dari sikap antar petani mitra rehabilitasi dalam berkerja sama, tolong menolong, saling menghormati, saling menghargai, serta nilai regilius yang dimiliki oleh petani mitra rehabilitasi. Jaringan sosial dalam kegiatan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dapat dilihat dari perluasan jaringan yang dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Meru Betiri dengan *stakeholders*. Partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dapat dilihat dari peran aktif petani mitra rehabilitasi serta *stakeholders* terkait dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi dalam mengelola lahan rehabilitasi. Model pengelolaan dalam program rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *social forestry*, dengan menggunakan pola pengelolaan lahan *agroforestry* yang menggunakan sistem *agrisilvikultur*.

Menurut Arifin S. (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi Di Desa Curahnongko Resort Andongrejo Dalam Program Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri”. Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi di Desa Curahnongko Resort Andongrejo dalam program rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri adalah sedang. Faktor yang berhubungan dengan tingkat Partisipasi Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi di Desa Curahnongko Resort Andongrejo adalah pendapatan dan luas lahan, sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan tingkat Partisipasi Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi di Desa Curahnongko Resort Andongrejo adalah umur, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendapatan dan pengalaman. Strategi peningkatan partisipasi adalah dengan cara mencegah perilaku petani yang tidak sesuai dengan peraturan program rehabilitasi dan melakukan pendampingan

intensif, baik dari Taman Nasional Meru Betiri maupun lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah Desa Curahnongko.

Menurut Adiputra K. (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Pola Kemitraan Petani Dengan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Dan Kontribusi Kegiatan Usahatani Di Zona Rehabilitasi Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”. Pola kemitraan TNMB dengan petani Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo yaitu TNMB menyediakan lahan di zona rehabilitasi kepada petani untuk melakukan usahatani dengan ketentuan luas lahan semampunya petani untuk merawat tanaman pokok yang terdapat pada masing-masing lahan dan TNMB memberikan pembinaan atau bimbingan teknis maupun nonteknis terhadap petani tentang kegiatan yang dilakukan di zona rehabilitasi. Petani diwajibkan menjaga dan merawat tanaman pokok agar tidak mati pada lahan yang disediakan TNMB selama melakukan usahatani pada zona rehabilitasi TNMB. Kontribusi pendapatan usahatani di zona rehabilitasi TNMB di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo terhadap pendapatan rumah tangga adalah tinggi. Variabel pengalaman kerjasama, *dummy* pola tanam, dan luas lahan berpengaruh nyata terhadap pendapatan usahatani di zona rehabilitasi TNMB sedangkan biaya produksi berpengaruh tidak nyata terhadap pendapatan usahatani di zona rehabilitasi TNMB. Dengan tingginya kontribusi pendapatan usahatani di zona rehabilitasi TNMB terhadap pendapatan rumah tangga petani tentunya memberikan peran yang paling besar terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga petani. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari bagi keluarga petani. Oleh karena itu diperlukan upaya pemberdayaan petani agar mampu mandiri setelah selesainya rehabilitasi.

Menurut Gabriela H. K. (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara”. Sampel yang diambil adalah kelompok tani tanaman jagung sebanyak 25 petani yang mendapat dana PUAP, 3 penyuluh, dan 3 dari lembaga terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) serta tabulasi dan Analisis *Scoring*. Dalam Analisis *Scoring* masing-masing kategori

diberi skor 1-5 sesuai dengan pertanyaan yang diajukan pada responden. Hasil pelaksanaan Program PUAP menggunakan model evaluasi CIPP dapat dilihat dari tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Hasil Rekapitulasi Jumlah Skor Pengambilan Data, dan Interpretasi Pada Tahapan *Context*

No	Pertanyaan	Total Skor	Interpretasi
1	Kegiatan petani setelah adanya program PUAP	125	Sangat Berhasil
2	Sikap petani setelah adanya program PUAP	111	Sangat Berhasil
3	Kesiapan penyuluh menumbuhkembangkan usaha agribisnis	15	Sangat Berhasil
4	Merealisasikan program PUAP	15	Sangat Berhasil
5	Strategi pemerintah agar program PUAP berhasil	14	Sangat Berhasil
6	Yang dilakukan pemerintah setelah adanya program PUAP	15	Sangat Berhasil

Sumber: Gabriela Hana Kaawoan, 2014

Ditinjau dari aspek konteks bahwa evaluasi program PUAP pada petani, penyuluh dan lembaga terkait mendapat hasil yang baik dengan interpretasi sangat berhasil. Hal ini dilihat dari usaha-usaha pertanian yang semakin meningkat, respon petani tentang program ini sangat baik, kesiapan dari penyuluh dalam sosialisasi dan kegiatan kelompok tani, penyuluh secara rutin merealisasikan program PUAP pada petani, serta strategi dari pemerintah agar program PUAP ini berhasil sudah terlaksana dengan baik.

Tabel 2.2 Hasil Rekapitulasi Jumlah Skor Pengambilan Data, dan Interpretasi Pada Tahapan *Input*

No	Pertanyaan	Total Skor	Interpretasi
1	Penyampaian penyuluh mengenai PUAP memberikan dampak yang jelas	117	Sangat Berhasil
2	Sikap petani sebelum adanya program PUAP	84	Cukup Berhasil
3	Sosialisasi PUAP oleh penyuluh	15	Sangat Berhasil
4	Pendampingan Bagi GAPOKTAN	15	Sangat Berhasil
5	Pelatihan bagi GAPOKTAN dan Kelompok Tani	15	Sangat Berhasil
6	Program telah memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam program PUAP	14	Sangat Berhasil
7	Pelatihan bagi Penyuluh dan GAPOKTAN	15	Sangat Berhasil
8	Pendampingan bagi Penyuluh	14	Sangat Berhasil

Sumber: Gabriela Hana Kaawoan, 2014

Ditinjau dari aspek input bahwa evaluasi program PUAP pada petani, penyuluh dan lembaga terkait mendapat hasil rata-rata tinggi. Tapi ada 1 yang mendapat interpretasi cukup berhasil, yaitu sikap dari pada petani sebelum adanya program PUAP ini. Sikap petani masih kurang termotivasi, kurangnya modal untuk membuka usaha, dan usaha yang dijalankan masih belum berkembang.

Tabel 2.3 Hasil Rekapitulasi Jumlah Skor Pengambilan Data, dan Interpretasi Pada Tahapan *Process*

No	Pertanyaan	Total Skor	Interpretasi
1	Kendala yang dihadapi dalam program PUAP	107	Sangat Berhasil
2	Kendala yang dijumpai penyuluh selama mendampingi petani	14	Sangat Berhasil
3	Penyampaian informasi kepada petani	15	Sangat Berhasil
4	Pelaksanaan program PUAP berjalan dengan baik	15	Sangat Berhasil

Sumber: Gabriela Hana Kaawoan, 2014

Ditinjau dari aspek proses bahwa evaluasi program PUAP pada petani, penyuluh dan lembaga terkait mendapat hasil rata-rata tinggi. Namun terkadang ada kendala dari penyuluh selama mendampingi petani yaitu pada saat mengumpulkan petani untuk mengadakan sosialisasi dan pengembalian dana setiap bulan masih belum berjalan dengan baik.

Tabel 2.4 Hasil Rekapitulasi Jumlah Skor Pengambilan Data, dan Interpretasi Pada Tahapan *Product*

No	Pertanyaan	Total Skor	Interpretasi
1	Mengembangkan usaha	102	Sangat Berhasil
2	Kinerja/fungsi GAPOKTAN	121	Cukup Berhasil
3	Keberhasilan penyuluh memberikan arahan yang baik bagi petani tentang program PUAP	15	Sangat Berhasil
4	Tujuan-tujuan yang ingin dicapai Pemerintah dalam program PUAP ini sudah terlaksana	15	Sangat Berhasil

Sumber: Gabriela Hana Kaawoan, 2014

Ditinjau dari aspek produk bahwa evaluasi PUAP pada petani, penyuluh dan lembaga terkait mendapat hasil yang baik dengan interpretasi sangat berhasil. Hasil ini dilihat dari peningkatan pendapat petani setelah adanya dana PUAP. Petani membuka usaha yang baru, penambahan luas lahan dan peningkatan hasil produksi, kinerja/fungsi dari GAPOKTAN berjalan sesuai dengan aturan dan berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan, program PUAP melalui evaluasi CIPP

pada petani, penyuluh dan lembaga terkait berhasil. Walaupun pada pendampingan penyuluh masih belum maksimal kepada petani dan pengawasan langsung dari dinas pertanian belum rutin dilakukan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial dihubungkan melalui aktor individual. Karenanya teori-teori tentang perubahan struktural menunjukkan bagaimana cara variabel-variabel mikro mempengaruhi motif dan pilihan individual dan bagaimana cara pilihan individual ini selanjutnya mengubah variabel makro (Hernes, 1976:514 dalam Agus, 2013). Konsep perubahan sosial meliputi ‘atom’ terkecil dinamika sosial, perubahan keadaan sistem sosial atau perubahan setiap aspeknya. Tetapi, perubahan tunggal jarang terjadi dalam keadaan terisolasi. Perubahan itu biasanya berkaitan dengan aspek lain dan sosiologi harus menemukan konsep yang lebih kompleks untuk menganalisis bentuk-bentuk kaitan tersebut.

Jadi, konsep proses sosial menunjukkan: (1) berbagai perubahan; (2) mengacu pada sistem sosial yang sama (terjadi di dalamnya atau mengubahnya sebagai satu kesatuan); (3) saling berhubungan sebab-akibat dan tak hanya merupakan faktor yang mengiringi atau yang mendahului faktor yang lain; (4) perubahan itu saling mengikuti satu sama lain dalam rentetan waktu (berurutan menurut rentetan waktu).

Tonny dan Bambang (1994) dalam Harnanto (2003), menyebutkan sumber perubahan dapat berasal dari dalam masyarakat (sistem sosial) itu sendiri, yang disebut faktor-faktor dalam dan dapat bersumber dari luar sistem tersebut yang disebut faktor-faktor luar. Disebutkan juga proses perubahan sosial dapat terjadi karena mata pencaharian yang lama tidak memuaskan lagi atau adanya faktor baru yang lebih memuaskan, pengganti faktor lama. Perubahan juga dapat terjadi karena terpaksa demi menyesuaikan dengan faktor lain yang sudah mengalami perubahan lebih dahulu.

Megasari (2008), mengatakan bahwa adanya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian banyak didasari oleh keinginan untuk memiliki pendapatan yang lebih besar dalam artian kehidupan yang lebih layak dengan terpenuhinya kebutuhan. Manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hierarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Motivasi manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi.

2.2.2 Konsep Dampak Perubahan Sosial

Masyarakat manapun pasti mengalami perubahan. Perubahan sosial itu ada yang cepat dan ada yang lambat, hal ini tergantung pada kecepatan, intensitas dan sumber-sumbernya. Banyak ahli yang memberikan pengertian tentang perubahan sosial. Menurut Soemardjan (1981), perubahan sosial (*social change*) adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk sistem nilai-nilai sosial, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok dalam masyarakat. Jadi perubahan pada satu segi akan berpengaruh atau merangsang perubahan tata hubungan antara kelompok-kelompok sosial.

Ada dua kategori perubahan yaitu: a) Perubahan yang disengaja (*intended change*) yaitu perubahan yang telah diketahui dan direncanakan sebelumnya oleh pelopor perubahan. *Intended change* ini dipelopori oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi (daerah) yang diprakarsai oleh Sultan. Jadi sultan sebagai pelopor perubahan sosial. b) Perubahan yang tidak disengaja (*unintended change*) yaitu perubahan yang terjadi tanpa diketahui atau direncanakan sebelumnya oleh seseorang anggota masyarakat seperti teknologi baru yaitu: pabrik-pabrik yang bermodal besar, penggunaan pesawat terbang, kendaraan bermotor (beroda dua dan empat), listrik masuk desa, televisi dan radio. Lebih lanjut Soemardjan mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi sumber perubahan sosial di masyarakat yaitu: a) Pertambahan jumlah penduduk (*biologi*). Pertambahan jumlah penduduk pasti akan menimbulkan

perubahan ekologis yang pada gilirannya merangsang terjadinya perubahan tata hubungan antar kelompok sosial. b) Penemuan dan inovasi teknologi (*technology*). c) Perubahan ideologi dasar suatu masyarakat seperti agama, konsep tentang negara dan orientasi masa depan (*ideologi*).

2.2.3 Status Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi dapat diartikan sebagai posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya (Basrowi dan Juariyah 2010). lebih lanjut, penelitian (Basrowi dan Juariyah 2010) menggunakan luas lahan garapan dan pekerjaan yang sedang dijalani sebagai indikator untuk mengukur status sosial ekonomi masyarakat Desa Srigading, Lampung timur yang mayoritas penduduknya adalah petani. Rosides 1986 dalam Lestarini 2007 menyatakan bahwa status sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam suatu rangkaian strata yang tersusun secara hierarkis yang merupakan kesatuan tertimbang hal-hal yang menjadi nilai dalam masyarakat, antara lain status, gaya hidup, kekuasaan, kekayaan, pendapatan. Soekanto (2005) menjelaskan ukuran atau kriteria status sosial ekonomi adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Masyarakat yang memiliki kekayaan paling banyak dapat digolongkan ke dalam status yang lebih tinggi. Kekayaan tersebut bersumber dari pendapatan dan kepemilikan aset. Ukuran kekuasaan dilihat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar menempati status yang lebih tinggi. Ukuran kehormatan dilihat dari masyarakat yang paling disegani dan dihormati akan menempati status yang lebih tinggi. Ukuran ilmu pengetahuan dilihat dari tingkat pendidikan yang dicapainya.

2.2.4 Rehabilitasi Lahan

Rehabilitasi lahan merupakan suatu usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya (Wahono, 2002).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem keidupan tetap terjaga. Kemudian di dalam pasal 41 disebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Prinsip dasar pelaksanaan rehabilitasi menurut Direktorat Konservasi Kawasan (dalam Purwaningsih, 2006) harus mengacu pada:

1. Pelestarian keanekaragaman jenis

Prinsip ini menuntu adanya keanekaragaman jenis yang tinggi dalam menentukan jenis tumbuhan, jumlah dan anakan atau bibit akan digunakan dalam rehabilitasi kawasan taman nasional

2. Pembinaan dan peningkatan kualitas habitat

Mengacu pada pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi untuk menjamin pulihnya kondisi dan fungsi kawasan secara lestari. Untuk itu setiap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kawasan taman nasional harus diarahkan semaksimal mungkin pada pemulihan kondisi kawasan seperti keadaan semula.

3. Melibatkan keikutsertaan para pihak terkait (*stakeholders*)

Setiap kegiatan yang dilakukan harus jelas standar, prosedur dan hasilnya serta jelas pula tanggung jawab setiap pihak yang berperan dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan taman nasional, sehingga masing-masing dapat dimintakan tanggung jawabnya. Kejelasan tanggung jawab ini menyangkut pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat

peserta kegiatan maupun perorangan dan atau lembaga-lembaga dan para pihak terkait.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan fungsi dan kondisi kawasan yang rusak melalui kegiatan penanaman, pengayaan jenis dan pemeliharaan dengan tumbuhan asli setempat. Petani peserta rehabilitasi adalah warga masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) yang ikut melakukan penanaman kembali di zona rehabilitasi (Balai Taman Nasional Meru Betiri, 2004).

2.2.5 Program Rehabilitasi Lahan Kritis di TNMB

Program rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi mulai dilaksanakan pada tahun 1999 dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan untuk melakukan penanaman kembali secara swadaya dengan tujuan awal supaya kawasan yang terbuka dapat segera dihijaukan kembali. program rehabilitasi dilakukan secara intensif mulai dari pembentukan kelompok tani mitra rehabilitasi, mengukur luasan lahan garapan masing-masing anggota kelompok tani, melakukan pendampingan, melakukan pertemuan kelompok tani, penyediaan bibit tanaman pokok, monitoring dan evaluasi. Penyusunan Rencana pengelolaan rehabilitasi TNMB ini memiliki maksud sebagai berikut :

1. Memberikan arahan bagi para pihak yang berkompeten dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) di kawasan TNMB.
2. Menyediakan suatu rencana pengelolaan (*Management Plan*) untuk mengelola pelaksanaan kegiatan RHL yang didasarkan kepada RTkRHL DAS, Pengelolaan hutan dan potensi sumberdaya (tenaga, sarana prasarana dan pendanaan) di kawasan TNMB. Adapun tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan rehabilitasi TNMB ini yang ingin dicapai adalah :
 - a. Agar proses penyusunan Kegiatan Rehabilitasi di TNMB dapat berjalan dengan baik dan dokumen RPRHL yang disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi lokasi/wilayah cakupan.

- b. Agar rehabilitasi hutan dan lahan di TNMB dapat dilaksanakan secara tepat, dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam pemulihan hutan dan lahan, pengendalian erosi, abrasi, dan pengembangan kelembagaan.

Program rehabilitasi yang dilakukan di kawasan TNMB mengacu pada Surat Persetujuan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 1008/Dj-VI/LH/1998 tanggal 4 Nopember 1998 dan surat Persetujuan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor: 1354/Dj-V/KK/1999. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Balai TNMB Nomor: 451/Sek.01/VI-TNMB/1999 tentang penetapan Tim Rehabilitasi Kawasan. Total luas lahan yang direncanakan untuk direhabilitasi adalah \pm 2.733,5 Ha. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan TN. Meru Betiri merupakan upaya untuk memulihkan fungsi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (SDAHE) maupun dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dalam mempercepat pemulihan fungsi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (SDAHE) dan kondisi sosial masyarakat Balai Taman Nasional Meru Betiri perlu merumuskan kebijakan pengelolaan. Kebijakan Balai Taman Nasional Meru Betiri secara rinci adalah :

1. Menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan dengan mengutamakan pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (SDAHE) serta fungsi lingkungan hidup;
2. Peningkatan upaya rehabilitasi hutan, flora dan fauna;
3. Peningkatan pengelolaan hutan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim dan lingkungan hidup;
4. Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis dari pihak TN. Meru Betiri sebagai pengelola kepada masyarakat sekitar kawasan khususnya petani mitra rehabilitasi.

Prinsip dasar program rehabilitasi adalah mengembalikan fungsi hutan seperti keadaan semula dengan melibatkan peran aktif masyarakat sekitar kawasan dengan azas saling menguntungkan disertai dengan kesepakatan tertulis. Bagi pihak TN. Meru Betiri mendapatkan keuntungan dengan tertanamnya tanaman pokok yang telah ditentukan, sedangkan keuntungan bagi masyarakat adalah melalui pengelolaan lahan untuk ditanami tanaman tumpang sari (semusim/palawija) serta mengambil buah dari tanaman pokok yang berkhasiat obat (seperti kluwak, kemiri, kedawung dll).

Zona rehabilitasi kawasan hutan TNMB seluas 2.733,59 Ha. Terletak di bagian utara dan sebagian kecil di bagian timur kawasan, dimana pada zona ini dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak perambahan dan penjarahan. Rencana pengelolaan rehabilitasi kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB):

A. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Kawasan Hutan per-Resort :

1. Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Hutan

Zona rehabilitasi kawasan hutan TNMB seluas 2.733,59 Ha. Terletak di bagian utara dan sebagian kecil di bagian timur kawasan, dimana pada zona ini dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak perambahan dan penjarahan. Total luas lahan yang direncanakan untuk direhabilitasi adalah $\pm 2.733,59$ Ha.

a. Pengelolaan secara fisik di Resort Wonoasri

Skala pengelolaan secara fisik kawasan hutan di Resort Wonoasri seluas 665,53 Ha adalah program rehabilitasi kawasan hutan berupa tanaman pokok yang menghasilkan buah seperti Kedawung, Kluwak, kemiri, Joho Juwet, Petai, Nangka, Mengkudu.

b. Pengelolaan secara fisik di Resort Andongrejo

Skala pengelolaan secara fisik kawasan hutan di Resort Andongrejo seluas 742,12 Ha adalah program rehabilitasi kawasan hutan berupa tanaman pokok yang menghasilkan buah seperti Kedawung, Kluwak, Kemiri, Joho, Juwet, Petai, Nangka, Mengkudu, Pinang.

c. Pengelolaan secara fisik di Resort Sanenrejo

Skala pengelolaan secara fisik kawasan hutan di Resort Sanenrejo seluas 1054,14 Ha adalah program rehabilitasi kawasan hutan berupa tanaman pokok yang menghasilkan buah seperti Kedawung, Kluwak, Kemiri, Joho, Juwet, Petai, Nangka, Mengkudu, Pinang.

d. Pengelolaan secara fisik di Resort Rajegwesi

Skala pengelolaan secara fisik kawasan hutan di Resort Rajegwesi seluas 271,8 Ha adalah program rehabilitasi kawasan hutan berupa tanaman pokok yang menghasilkan buah seperti Kedawung, Kluwak, Kemiri, Joho, Juwet, Petai, Nangka, Mengkudu, Pinang.

2. Organisasi

Pembangunan manusia sebagai sumberdaya, salah satu sarannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengupayakan suatu pengolahan sumber daya alam secara optimal dan lestari. Sikap positif tersebut diharapkan akan lebih menunjang keberhasilan program kegiatan rehabilitasi kawasan hutan TNMB. Pelaksana kegiatan rehabilitasi kawasan hutan TNMB diorganisasikan mulai pelaksana tingkat lapangan sampai penanggung jawabnya. Pelaksana di tingkat lapangan dalam hal ini di tingkat Resort dilakukan oleh petani yang terorganisir dalam Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi yang sudah terbentuk dan mendapatkan pembinaan rutin dari petugas yang ada di tiap-tiap resort TNMB.

3. Pelaksanaan

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Kawasan Hutan TNMB dilaksanakan di 2 (dua) SPTN meliputi 4 (empat) resort dan terdiri dari 5 (lima) desa dengan luas lahan yang akan menjadi sasaran kegiatan rehabilitasi kawasan hutan seluas 2733,59 Ha.

4. Pengendalian

Menurut pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa cakupan pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi kawasan hutan sebagai berikut :

- a) Pengendalian meliputi kegiatan: (Monitoring; Evaluasi; Pelaporan, dan Tindak lanjut).
- b) Kegiatan monitoring dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan TNMB.
- c) Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi kawasan TNMB yang dilakukan secara periodik.
- d) Kegiatan pelaporan dilakukan untuk menyelaraskan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- e) Kegiatan tindak lanjut merupakan hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan TNMB.

B. Rencana Pembiayaan

Rencana pembiayaan akan dibebankan kepada DIPA Balai Taman Nasional Meru Betiri tahun anggaran berjalan.

C. Rencana Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Kawasan Hutan

1. Pengembangan Sosial Ekonomi

Upaya rehabilitasi kawasan hutan TNMB pada hakikatnya mengupayakan terciptanya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan TNMB. Upaya tersebut di samping mengusahakan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik teknis rehabilitasi kawasan hutan, juga harus memperhatikan factor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yang bersifat positif dan negatif. Kegiatan pengembangan ekonomi social masyarakat dalam rangka rehabilitasi kawasan hutan harus berdasarkan informasi mengenai kondisi social ekonomi masyarakat setempat.

2. Pengembangan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan

Kegiatan Rehabilitasi kawasan hutan TNMB dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan petani, di samping itu juga menciptakan peluang usaha lain yaitu aneka usaha kehutanan dalam bentuk pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman pokok. Jenis usaha

pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman pokok yang umumnya dilaksanakan di wilayah TNMB adalah :

- a. Penanaman tanaman kayu-kayuan dengan tanaman pangan;
- b. Penanaman tanaman kayu-kayuan dengan tanaman obat (Wana Farma).

D. Pembenihan dan Teknologi Rehabilitasi

1. Pengembangan perbenihan;

Pembenihan dan pembibitan pada tahun pertama pihak TNMB melakukan pengadaan bibit, kemudian didistribusikan kepada petani sesuai dengan luasan lahan. Untuk tahun kedua dan seterusnya diharapkan pihak petani sendiri yang menyediakan benih dan bibit, kemudian ditanam di lahan masing-masing.

2. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;

Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud di atas, antara lain :

- a. Teknologi perencanaan dan monitoring evaluasi RHL;
- b. Teknologi pelaksanaan RHL.

Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan. Teknologi perencanaan dan monitoring evaluasi RHL sebagaimana dimaksud di atas antara lain pengembangan teknologi serta metoda/prosedur perencanaan dan monitoring evaluasi. Teknologi pelaksanaan RHL sebagaimana dimaksud di atas antara lain pengembangan teknologi RHL berbasis kearifan masyarakat serta sumberdaya lokal.

3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk mengamankan kegiatan dan hasil tanaman dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.

4. Penyuluhan;

Penyuluhan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pendidikan non formal yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat menjadi pihak yang peduli terhadap kelestarian fungsi hutan dan lahan. Sasaran penyuluhan adalah seluruh masyarakat yang hidup dan kehidupannya terkait dengan pelestarian

hutan dan lahan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan RHL.

5. Pelatihan;

Pelatihan diberikan kepada semua pelaku RHL, yaitu unsur masyarakat, kelompok petani rehabilitasi, unsur pendamping dan aparatur pelaksana kegiatan.

6. Pengembangan Kelembagaan;

Berdasarkan pasal 5 ayat 3 Peraturan pemerintah nomor 76 Tahun 2008 menyatakan bahwa aspek kelembagaan meliputi sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing dan tata hubungan kerja dengan sasaran pengembangan kelembagaan adalah terbangunnya mekanisme kegiatan yang teratur dan saling mendukung atau terkoordinasi dengan semua pihak yang terkait, sehingga pada akhirnya memberikan situasi dan kondisi yang kondusif dalam pemberian pelayanan sehingga terbangunnya masyarakat madani.

7. Pembinaan;

Pembinaan sebagaimana dimaksud di atas, antara lain pembinaan aparat teknis serta aparat desa setempat yang terkait dengan kegiatan RHL.

8. Pengawasan;

Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, antara lain pengawasan fungsional oleh Balai TN. Meru Betiri ke tiap SPTNW dan Resort-resort. Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, ketaatan pada peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja petugas di lapangan serta masyarakat pelaksana kegiatan RHL.

E. Rencana Pengembangan Kelembagaan;

Pengembangan kelembagaan RHL meliputi penyiapan tenaga pelaksana dan pengendalian kegiatan RHL, baik aparat maupun masyarakat, penyiapan organisasi pemerintahan/masyarakat/ kelompok tani, penyiapan kelembagaan antar stakeholders, dan perumusan tata hubungan kerja antar unit kerja dan pelaksanaannya. Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas diarahkan kepada organisasi, sumberdaya manusia, kewenangan serta tata

hubungan kerja dalam setiap dimensi penyelenggaraan program Rehabilitasi Kawasan TNMB yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian. Dalam hal identifikasi kelembagaan tersebut dinilai masih relatif lemah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan yang bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan yang ada. Kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas baik kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah.

F. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi adalah merupakan rangkaian kegiatan pengendalian program. Kegiatan monitoring dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan secara periodik. Dalam menentukan rencana monitoring dan evaluasi yang perlu ditetapkan adalah :

- a. Tim / pelaksana monitoring dan evaluasi;
- b. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- c. Sasaran monitoring dan evaluasi;
- d. Metode monitoring dan evaluasi yang akan diterapkan;
- e. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi.

Unsur-unsur yang dimonitoring meliputi kemajuan atau perkembangan fisik pekerjaan antara lain fisik tanaman, bangunan konservasi tanah, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan RHL serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya.

2.2.6 Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP). CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University. Model evaluasi ini pada

awalnya digunakan untuk mengevaluasi ESEA (the Elementary and Secondary Education Act). CIPP merupakan singkatan dari, *context evaluation*: evaluasi terhadap konteks, *input evaluation*: evaluasi terhadap masukan, *process evaluation*: evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation*: evaluasi terhadap hasil.

Menurut Stufflebeam (1993) dalam Daud Pratama (2014) mengungkapkan bahwa, “*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve*”. Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Berikut ini akan di bahas komponen atau dimensi model CIPP yang meliputi *Context, Input, Process, Product*.

1. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

2. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)

Evaluasi input atau evaluasi masukan berguna membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi: 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana atau anggaran, dan 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

3. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen

apa yang perlu diperbaiki. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

4. *Product Evaluation* (Evaluasi Produk/ Hasil)

Dari evaluasi produk/hasil diharapkan dapat membantu pimpinan proyek untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program. evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/ modifikasi, atau bahkan dihentikan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya adalah Taman Nasional (TN). Salah satu tempat konservasi hutan yang berupa Taman Nasional adalah Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) yang berada di Provinsi Jawa Timur. Tugas pokok Balai TNMB adalah menjalankan pengelolaan kawasan TNMB dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan TNMB mengalami tekanan yang disebabkan adanya gangguan dan ancaman terhadap kelestarian kawasan TNMB sebagai kawasan konservasi. Gangguan-gangguan ini banyak disebabkan oleh tangan manusia, seperti penebangan liar, perambahan kawasan dan pencurian hasil hutan baik kayu maupun non kayu telah mengakibatkan kerusakan kawasan yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya degradasi hutan dan terganggunya keseimbangan lingkungan dan fungsi yang terdapat dalam kawasan TNMB. Puncak gangguan kawasan TNMB terjadi ketika era reformasi, yaitu terjadi perambahan besar-besaran hutan (kayu jati) yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan kawasan TNMB menjadi terbuka dan gundul. Melihat permasalahan yang besar ini pihak pengelola TNMB mengupayakan untuk melaksanakan program

rehabilitasi lahan hutan kritis. Rehabilitasi ini bertujuan agar Taman Nasional dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Areal ini kemudian ditetapkan sebagai zona rehabilitasi.

Kegiatan rehabilitasi kawasan TNMB menggunakan pola kolaboratif/kemitraan yaitu rehabilitasi kawasan yang mengikutsertakan masyarakat sekitar kawasan TNMB melalui kesepakatan bersama secara tertulis yang saling menguntungkan dan didukung oleh berbagai pihak (stakeholders). Stakeholder berkewajiban membantu dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Balai TNMB dalam setiap kegiatan rehabilitasi. Stakeholder yang terlibat dalam program rehabilitasi ini adalah Kementerian Kehutanan, Dirjen PHPA, TNMB, Pemerintah Desa Sanenrejo serta LSM Konservasi Alam Indonesia Lestari (KAIL). Program Rehabilitasi TNMB yang dalam pengelolaan lahannya melibatkan masyarakat Desa Sanenrejo dimana mereka yang mengelola kegiatan rehabilitasi, pihak TNMB selaku pemberi program juga memantau jalannya dari program rehabilitasi tersebut.

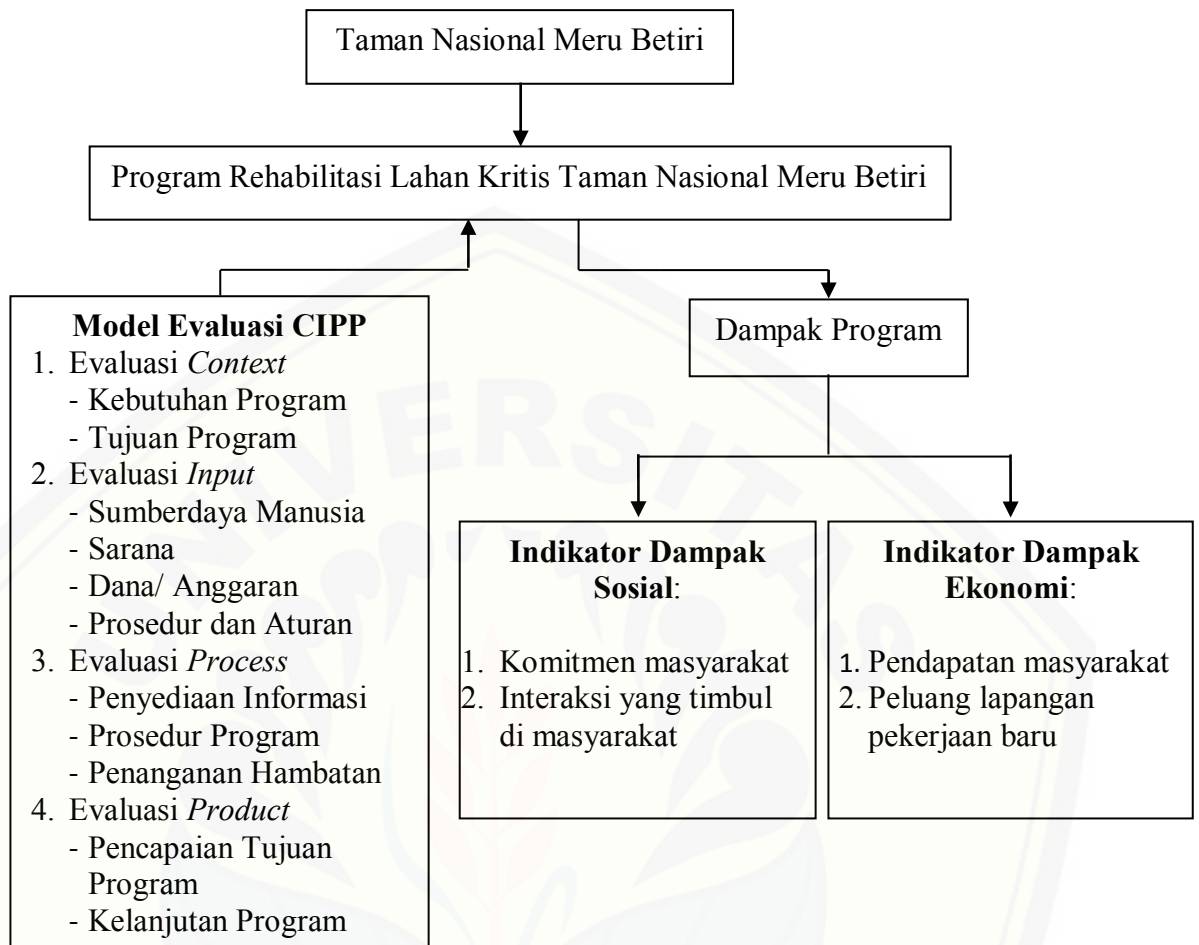
Adanya Program Rehabilitasi Lahan Kritis di TNMB, memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi terhadap masyarakat di Desa Sanenrejo. Dampak sosial yang terjadi pada Masyarakat Desa Sanenrejo dengan adanya program tersebut berupa komitmen masyarakat dalam melestarikan hutan dan interaksi masyarakat. Keberadaan TNMB di Kabupaten Jember hendaknya perlu untuk dilestarikan agar taman nasional tersebut tetap terjaga manfaat dan kelestariannya. Komitmen masyarakat dalam upaya untuk pelestarian dan pemanfaatan hasil taman nasional harus melalui keputusan bersama antara masyarakat di desa sekitar Taman Nasional Meru Betiri terutama Desa Sanenrejo dengan pihak taman nasional itu sendiri. Kesadaran akan pentingnya taman nasional harus ditumbuhkan dalam pikiran Masyarakat Desa Sanenrejo, demi untuk kesejahteraan bersama. Sedangkan interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial.

Sedangkan dampak ekonomi yang terjadi pada Masyarakat Desa Sanenrejo dengan adanya program tersebut berupa pendapatan masyarakat dan peluang lapangan pekerjaan baru. Peluang lapangan pekerjaan baru ini berkaitan

dengan adanya Program Rehabilitasi Lahan Kritis Dalam Taman Nasional Meru Betiri. Apakah program tersebut dapat menciptakan peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Sanenrejo. Dengan adanya peluang lapangan pekerjaan baru tersebut, secara otomatis dapat mempengaruhi pendapatan Masyarakat Desa Sanenrejo.

Dalam suatu pelaksanaan program pasti ada evaluasi mengenai program tersebut, evaluasi itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah berjalan dan keberhasilan tujuan dari program yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan penting suatu evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Pada Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dengan studi kasus di Desa Sanenrejo ini peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

Pada tahapan Konteks (*Context*), tahapan ini berguna untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan tujuan program dari Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kawasan Taman nasional Meru Betiri. Pada tahapan masukan (*Input*) komponen evaluasi Program Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kawasan Taman nasional Meru Betiri yang digunakan meliputi: 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana program, 3) Dana atau anggaran, 4) Prosedur dan aturan. Pada tahapan proses (*Process*), digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, serta seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Pada tahapan terakhir yaitu tahapan produk/ hasil (*Product*), penilaian ini dilakukan untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Serta, pada tahapan ini peneliti dapat menentukan atau memberikan rekomendasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah penelitian ini ditentukan secara sengaja (*Purposive Method*). Daerah yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Desa Sanenrejo merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Desa Sanenejo secara tidak langsung turut berkontribusi dalam pengembangan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Selain sebagai desa penyangga, masyarakat Desa Sanenrejo juga berperan aktif dalam mengelola lahan rehabilitasi.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan metode analitis. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode analitis merupakan kelanjutan metode deskriptif yang berfungsi untuk menganalisa dan menghitung secara cermat dan teliti terhadap faktor-faktor atau data (Nazir, 2009).

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah Masyarakat Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang bermata pencaharian sebagai petani dan tergabung dengan Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi di wilayah tersebut. Untuk itu metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Menurut Nazir (2009) (*Simple Random Sampling*), yaitu suatu metode pengambilan sampel yang tiap-tiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Terdapat Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi di Desa Sanenrejo ini yang beranggotakan 200 petani anggota. Dengan menggunakan metode ini nantinya akan mengambil responden sebanyak 30 orang petani.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara terstruktur (data primer), studi pustaka (data sekunder), dan observasi.

1. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan kuisisioner pada petani yang akan dijadikan sampel penelitian. Wawancara terstruktur tergolong dalam data primer. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari Masyarakat Desa Sanenrejo. Metode wawancara dilakukan dengan menggunakan kuisisioner (terlampir) untuk mendapatkan data dan informasi dari responden maupun informan kunci.
2. Studi pustaka yaitu dilakukan dengan memperoleh data dari instansi terkait maupun buku-buku dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi pustaka termasuk pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk dokumen-dokumen (Suryabrata, 2012). Studi dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari Balai Taman Nasional Meru Betiri, Kantor Desa Sanenrejo, dan literatur-literatur yang berasal dari buku, jurnal, skripsi maupun tesis.
3. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung mengenai data yang diperoleh dari wawancara maupun studi pustaka guna menguatkan kebenaran data tersebut. Menurut Hikmat (2011), observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Observasi yang dilakukan berupa pengamatan jalannya program dan kesesuaian data yang dipaparkan responden dengan kenyataan di lapangan.

3.5 Metode Analisa Data

Permasalahan pertama dan kedua dianalisis dengan menggunakan skala *Likert*. Skala yang digunakan dalam pengukuran fenomena-fenomena dalam Masyarakat Desa Sanenrejo yaitu dengan batasan 5 (lima) indikator, misalnya: sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik.

Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pernyataan. Indikator yang akan diukur dengan menggunakan skala *Likert* ini adalah: (1) indikator dampak sosial; (2) indikator dampak ekonomi; dan (3) indikator CIPP.

A. Indikator Dampak Sosial

1. Komitmen Masyarakat

Tabel 3.1 Atribut Komitmen Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

No	Atribut Komitmen Masyarakat	Jawaban				
		SB	B	C	TB	STB
1.	Kehadiran dalam rapat/ penyuluhan program rehabilitasi					
2.	Kesadaran masyarakat					
3.	Pelaksanaan program					
4.	Inisiatif masyarakat terhadap program					

2. Interaksi Masyarakat

Tabel 3.2 Atribut Interaksi Masyarakat Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

No	Atribut Interaksi Masyarakat	Jawaban				
		SB	B	C	TB	STB
1.	Gotong royong/ kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan program					
2.	Hubungan antara masyarakat dengan TNMB					
3.	Keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan masyarakat					

B. Indikator Dampak Ekonomi

1. Pendapatan

Tabel 3.3 Atribut Pendapatan Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

No	Atribut Pendapatan	Jawaban				
		SB	B	C	TB	STB
1.	Peningkatan pendapatan					
2.	Tingkat konsumsi masyarakat					

2. Lapangan Kerja

Tabel 3.4 Atribut Lapangan Kerja Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

No	Atribut Lapangan Kerja	Jawaban				
		SB	B	C	TB	STB
1.	Penyerapan tenaga kerja					
2.	Peluang lapangan kerja baru					

C. Indikator CIPP

1. Variabel Evaluasi *Context*

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

Tabel 3.5 Atribut Evaluasi *Context* Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

No	Atribut Evaluasi <i>Context</i>	Jawaban				
		SB	B	C	TB	STB
1.	Pemenuhan kebutuhan dalam Program					
2.	Kesejahteraan masyarakat					
3.	Kelestarian hutan					
4.	Merumuskan strategi kebijakan rehabilitasi lahan kritis					
5.	Kelayakan strategi kebijakan rehabilitasi lahan kritis					
6.	Peningkatan ekonomi masyarakat					

2. Variabel Evaluasi *Input/ Masukan*

Evaluasi input atau evaluasi masukan berguna membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Tabel 3.6 Atribut Evaluasi *Input/ Masukan* Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

No	Atribut Evaluasi <i>Input/ Masukan</i>	Jawaban				
		SB	B	C	TB	STB
1.	Sosialisasi program rehabilitasi lahan kritis oleh penyuluh					
2.	SDM pada masyarakat di Desa Sanenrejo					
3.	SDM pada penyuluh program rehabilitasi lahan kritis					
4.	Sarana dan prasarana pada program rehabilitasi lahan kritis					
5.	Anggaran dana program rehabilitasi lahan kritis					

3. Variabel Evaluasi *Process*

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.

Tabel 3.7 Atribut Evaluasi *Process* Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

No	Atribut Evaluasi <i>Process</i>	Jawaban				
		SB	B	C	TB	STB
1.	Keteraturan penjadwalan program					
2.	Pengawasan program oleh TNMB					
3.	Penanganan hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi lahan kritis					
4.	Pemanfaatan sarana dan prasarana program					

4. Variabel Evaluasi *Product*

Evaluasi *Product* merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 3.8 Atribut Evaluasi *Product* Pada Dampak Program Rehabilitasi Lahan Kritis Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

No	Atribut Evaluasi <i>Product</i>	Jawaban				
		SB	B	C	TB	STB
1.	Tingkat pencapaian tujuan program rehabilitasi lahan kritis					
2.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya TNMB					
3.	Pendapatan masyarakat setelah adanya program rehabilitasi lahan kritis					

Keterangan:

SB = Sangat Baik
 B = Baik
 C = Cukup
 TB = Tidak Baik
 STB = Sangat Tidak Baik

Bila: SB diberi skor = 5
 B diberi skor = 4
 C diberi skor = 3
 TB diberi skor = 2
 STB diberi skor = 1

Jumlah skor untuk responden yang menjawab SB = $n \times 5$ =
 Jumlah skor untuk responden yang menjawab B = $n \times 4$ =
 Jumlah skor untuk responden yang menjawab C = $n \times 3$ =
 Jumlah skor untuk responden yang menjawab TB = $n \times 2$ =
 Jumlah skor untuk responden yang menjawab STB = $n \times 1$ = _____ +
 Total =

Berdasarkan total nilai tersebut, didapatkan hasil presentase dari setiap variabel melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Presentase} = \frac{\text{Total Nilai}}{\text{Nilai Maksimal}}$$

Selanjutnya dilakukan interpretasi sebagai berikut:

0% - 20% = Sangat Tidak Baik
 21% - 40% = Tidak Baik
 41% - 60% = Cukup
 61% - 80% = Baik
 81% - 100% = Sangat Baik

3.6 Definisi Operasional

1. Sumberdaya hutan adalah seluruh kekayaan alam yang terdapat di hutan yang berpotensi dan bisa dimanfaatkan.
2. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
4. Hutan konservasi adalah salah satu hutan dengan kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
5. Rehabilitasi hutan adalah pemulihan kembali sumberdaya hutan yang telah rusak.
6. Taman nasional adalah tanah yang dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat dari perkembangan manusia dan polusi.
7. Desa penyangga adalah wilayah pedesaan yang berada di luar kawasan suaka alam baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak, yang diperlukan maupun menjaga ketentuan kawasan suaka alam.
8. Status sosial ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupi kebutuhan hidupnya.
9. Sistem adalah bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat berfungsi melakukan suatu kerja untuk tujuan tertentu.
10. Sistem social adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen sosial. Elemen tersebut terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya.

11. Kedudukan (status) adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestasi, hak, serta kewajibannya.
12. Norma adalah pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat atau biasa disebut dengan peraturan sosial.
13. Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak-pihak lain.
14. Sanksi adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya.
15. Fasilitas adalah semua bentuk cara, jalan, metode, dan benda-benda yang digunakan manusia untuk menciptakan tujuan sistem sosial itu sendiri.
16. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP).
17. Evaluasi *context* menentukan kebutuhan, masalah-masalah, asset, dan kesempatan untuk membantu pengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu kelompok lebih luas dalam pengambilan tujuan, prioritas, dan hasil.
18. Evaluasi *input*, pengambil keputusan memilih penyusunan rencana, penulisan proposal, alokasi sumber daya, pengelolaan ketenagaan, jadwal kegiatan, tersusun rapi dalam membantu pengambil keputusan berusaha menyiapkan rencana dan pembiayaan.
19. Evaluasi *process* menilai pelaksanaan rencana untuk membantu staf melaksanakan kegiatan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja program, dan membuat penafsiran hasilnya.
20. Evaluasi *product* mengidentifikasi dan menilai hasil baik jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu staf untuk lebih fokus pada hasil penting dan hasil akhir serta mengukur penting dan hasil akhir serta mengukur keberhasilan upaya dalam memenuhi target yang ditetapkan.
21. Metode Analitik merupakan kelanjutan dari metode deskriptif yang berfungsi untuk menganalisa dan menghitung secara cermat dan teliti terhadap faktor-faktor atau data.

22. Responden adalah sumber informasi peneliti dalam melakukan penelitian yang terdiri dari Pihak Balai Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), masyarakat dan perangkat Desa Sanenrejo.
23. Observasi (pengamatan) merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data penelitian.
24. Interview (wawancara) merupakan kegiatan menggali informasi kepada responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjawab permasalahan yang akan dikaji.
25. Quisioner (panduan riset) merupakan alat bantu peneliti dalam melakukan interview.
26. Dokumentasi merupakan rekaman hasil pencarian oleh peneliti, dapat berupa rekaman suara atau gambar.

BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Topografi

Desa Sanenrejo merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Awalnya Desa Sanenrejo merupakan bagian wilayah Desa Curahnongko, dengan 2 (dua) pembagian wilayah yaitu Blok Barat Dukuh Krajan dan Blok Timur Dukuh Mandilis. Batas-batas Desa Sanenrejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas-batas Desa Sanenrejo

No.	Batas	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Curahtakir	Tempurejo
2.	Sebelah Selatan	Curahnongko, Andongrejo, TNMB	Tempurejo
3.	Sebelah Barat	Wonoasri	Tempurejo
4.	Sebelah Timur	Mulyorejo	Silo

Sumber : Profil Desa Sanenrejo, 2015

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Desa Sanenrejo berbatasan dengan 4 desa dan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Batas sebelah utara Desa Sanenrejo adalah Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo. Batas sebelah selatan Desa Sanenrejo adalah Desa Curahnongko, Desa Andongrejo, dan TNMB Kecamatan Tempurejo. Batas sebelah barat Desa Sanenrejo adalah Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo, sedangkan batas sebelah timur Desa Sanenrejo adalah Desa Mulyorejo Kecamatan Silo.

Wilayah Desa Sanenrejo digunakan untuk berbagai macam fungsi. Fungsi penggunaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tanah yang ada. Beberapa contoh fungsi penggunaan lahan diantaranya lahan sebagai pemukiman, persawahan, perkebunan dan pekarangan, serta prasarana umum lainnya. Dibawah ini adalah tabel luas wilayah Desa Sanenrejo menurut penggunaannya:

Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Sanenrejo Menurut Penggunaannya

No.	Uraian	Satuan (Ha/m ²)
1.	Luas Pemukiman dan Prasarana Umum Lainnya	215,19
2.	Luas Persawahan	244,271
3.	Luas Perkebunan dan Pekarangan	30
Total Luas		489,461

Sumber : Profil Desa Sanenrejo, 2015

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa fungsi penggunaan lahan terbesar di Desa Sanenrejo adalah luas persawahan sebesar 244,271 Ha/m². Selanjutnya luas pemukiman dan prasarana umum lainnya memiliki luasan sebesar 215,19 Ha/m², dan luas perkebunan dan pekarangan dengan luasan lahan sebesar 30 Ha/m².

4.1.2 Keadaan Iklim Desa Sanenrejo

Desa Sanenrejo berada dalam ketinggian 425 mdl dengan intensitas curah hujan sebesar 2,154 Mm sepanjang tahun. Ketinggian tempat tidak berpengaruh pada keadaan suhu, hal ini dapat dilihat bahwa suhu rata-rata harian Desa Sanenrejo 30 °C. Suhu rata-rata harian Desa Sanenrejo sebesar 30 °C dapat dikatakan cukup panas. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember di Desa Sanenrejo. Di bawah ini adalah tabel 4.3 yang menunjukkan keadaan iklim desa curahnongko:

Tabel 4.3 Keadaan Iklim Desa Sanenrejo

No.	Uraian	Satuan
1.	Curah Hujan	2,154 Mm
2.	Kelembapan	-
3.	Suhu Rata-rata Harian	30 °C
4.	Tinggi Tempat dari Permukaan Laut	425 mdl

Sumber : Profil Desa Sanenrejo, 2015

4.1.3 Topografi Desa Sanenrejo

Desa Sanenrejo adalah desa yang terletak di dataran yang cukup tinggi, yaitu 425 mdl. Selain itu, topografi Desa Sanenrejo terbentang diantara bukit-bukit seluas 33,1 Ha dan dibawah lereng gunung seluas 30 Ha. Dibawah ini merupakan Tabel 4.4 yang menunjukkan topografi Desa Sanenrejo.

Tabel 4.4 Topografi Desa Curahnongko

No.	Bentangan Wilayah	Satuan (Ha/m ²)
1.	Desa dataran rendah	-
2.	Desa berbukit-bukit	33,1
3.	Desa dataran tinggi/pegunungan	-
4.	Desa lereng gunung	30
5.	Desa pesisir	-
6.	Desa kawasan rawa	-
7.	Desa kawasan gambut	-
8.	Desa aliran sungai	-
9.	Desa bantaran sungai	-

Sumber : Profil Desa Sanenrejo, 2015

Desa Sanenrejo merupakan desa penyangga Taman Nasional Meru Betiri, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi. Hal ini dapat dilihat dari wilayah Desa Sanenrejo yang terdapat kawasan hutan lindung.

4.2 Sumber Daya Manusia

4.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang paling penting dalam upaya peningkatan mutu kualitas hidup manusia itu sendiri. Potensi sumber daya manusia di Desa Sanenrejo dapat dikategorikan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir sama jumlahnya. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 3721 jiwa, sedangkan untuk penduduk perempuan sebesar 3668 jiwa. Total penduduk Desa Sanenrejo adalah sebesar 7389 jiwa dengan jumlah 2292 kepala keluarga. Berikut ini adalah tabel 4.5 yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Sanenrejo:

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Sanenrejo

No.	Uraian	Keterangan (Jiwa)
1.	Laki-laki	3721
2.	Perempuan	3668
	Total	7389

Sumber : Profil Desa Sanenrejo, 2015

4.2.2 Agama dan Kepercayaan

Agama merupakan keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh setiap manusia sebagai landasan hidup. Terdapat berbagai agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Agama yang dianut oleh penduduk Desa Sanenrejo sebagian besar adalah agama Islam, yaitu sejumlah 7327 jiwa. Sedangkan untuk Agama Kristen, dianut oleh 18 jiwa. Agama lain yang dianut oleh penduduk adalah Katolik sejumlah 54 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7 Agama Dan Kepercayaan Penduduk Desa Sanenrejo

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	7327
2.	Kristen	8
3.	Katolik	54
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Khonghucu	-
Jumlah		7389

Sumber : Profil Desa Sanenrejo, 2015

4.2.3 Rekapitulasi Usia Penduduk Desa Sanenrejo

Rekapitulasi usia penduduk merupakan persebaran penduduk berdasarkan kategori tingkatan umur. Hal ini bermanfaat dalam menentukan usia produktif kerja penduduk. Tabel dibawah ini adalah Tabel 4.8 yang menunjukkan jumlah rekapitulasi usia penduduk di Desa Sanenrejo

Tabel 4.8 Rekapitulasi Usia Penduduk Desa Sanenrejo

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 -- 4	1332
2	5 -- 9	1111
3	10 -- 14	733
4	15 -- 19	280
5	20 -- 24	290
6	25 -- 29	261
7	30 -- 34	336
8	35 -- 39	333
9	40 -- 44	209
10	45 -- 49	222
11	>50	2282

Sumber : Profil Desa Sanenrejo, 2015

Tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk Desa Sanenrejo sebagian besar pada usia >50 tahun yaitu sebesar 2282 jiwa. Pada usia 0-4 tahun jumlah penduduk Desa Sanenrejo sebesar 1332 jiwa atau terbesar kedua. Usia penduduk 5-9 tahun adalah sebesar 1111 jiwa atau terbesar ketiga. Jumlah penduduk pada Usia penduduk 40-44 tahun dan 45-49 tahun tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 209 jiwa dan 222 jiwa merupakan jumlah tersedikit penduduk Desa Sanenrejo.

4.2.4 Tingkat Pendidikan Desa Sanenrejo

Tingkat pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menunjang kualitas sumber daya manusia. Berbagai tingkat pendidikan di Desa Sanenrejo ditempuh oleh penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang tertinggi agar kehidupan dapat lebih baik. Tabel dibawah ini merupakan tingkatan pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Sanenrejo.

Tabel 4.9 Tingkat Pendidikan Desa Sanenrejo

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1.	Usia 3-6 tahun yang sudah masuk TK	239	236
2.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	214	192
3.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	25	29
4.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	238	247
5.	Tamat SD/ sederajat	1640	1546
6.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	403	409
7.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	112	110
8.	Tamat SMP/ sederajat	213	142
9.	Tamat SMA/ sederajat	225	311
10.	Tamat D-1	4	6
11.	Tamat D-2	42	21
12.	Tamat D-3	7	4
13.	Tamat S-1	67	51
14.	Tamat S-2	4	-
15.	Tamat S-3	-	-
Jumlah		3721	3668

Sumber : Profil Desa Sanenrejo, 2015

Pada Tabel 4.9 dapat dijelaskan sebagian besar penduduk Desa Curahnongko berpendidikan tamat SD sejumlah 1640 laki-laki dan 1546 perempuan. Terbesar kedua tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk

Desa Sanenrejo adalah SLTP, akan tetapi tidak sampai tamat dengan jumlah 403 laki-laki dan 409 perempuan. Jumlah penduduk yang tamat SMP dan SMA hampir sama pada penduduk laki-laki yaitu 213 jiwa untuk yang tamat SMP dan 225 jiwa untuk yang tamat SMA. Sedangkan untuk penduduk perempuan, 142 jiwa tamat SMP dan 311 jiwa tamat SMA.

Selain menempuh wajib belajar 12 tahun, terdapat juga penduduk yang menempuh pendidikan tinggi, mulai dari tingkatan Diploma sampai Sarjana. Jumlah penduduk yang tamat D-1 adalah 10 jiwa yang terdiri dari 4 jiwa laki-laki dan 6 jiwa perempuan, tamat D-2 sejumlah 63 jiwa yang terdiri dari 42 jiwa laki-laki dan 21 jiwa perempuan dan untuk yang tamat D-3 sejumlah 11 jiwa yang terdiri dari 7 jiwa laki-laki dan 4 jiwa perempuan. Penduduk Sanenrejo yang menempuh pendidikan S-1 sejumlah 112 jiwa yang terdiri 61 laki-laki dan 51 perempuan. Tingkat pendidikan S-2 ditempuh sejumlah 4 jiwa penduduk laki-laki, akan tetapi untuk tingkat pendidikan S-3 belum ada penduduk yang menempuhnya.

4.2.5 Mata Pencaharian Pokok Desa Sanenrejo

Mata pencaharian adalah tempat bekerja seseorang untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat berbagai macam jenis mata pencaharian, diantaranya petgani, pegawai negeri sipil, karyawan, nelayan, dokter dan sebagainya. Begitu halnya dengan penduduk Desa Sanenrejo, sebagian besar penduduk terutama yang berada dalam usia kerja akan bekerja pada berbagai jenis mata pencaharian yang sesuai. Dibawah ini Tabel jenis mata pencaharian penduduk Desa Sanenrejo.

Tabel 4.10 Mata Pencaharian Pokok Desa Sanenrejo

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Pertanian	1787
2	Perkebunan	22
3	Jasa / Perdagangan	
	1. Jasa Pemerintahan	48
	2. Jasa Perdagangan	627
	3. Jasa Angkutan	25
	4. Jasa Ketrampilan	399
	5. Jasa Kesehatan	9
5	Sektor Industri	18
6	Sektor lainnya / Peternakan	1382
7	Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	48
	Lain-Lain	3024
JUMLAH KESELURUHAN		7389

Sumber : Profil Desa Sanenrejo, 2015

Dari Tabel 4.10 dijelaskan, petani adalah mata pencaharian utama penduduk Desa Sanenrejo dengan jumlah 1787 jiwa. 1382 jiwa adalah jumlah penduduk Desa Sanenrejo yang bekerja di bidang peternakan/ sektor lainnya. Terdapat 1108 jiwa yang bekerja di bidang jasa, baik jasa pemerintahan, perdagangan, angkutan, keterampilan, dan kesehatan. Selain tiga mata pencaharian utama tersebut, sebagian kecil penduduk Desa Sanenrejo juga bermata pencaharian disektor perkebunan sebesar 22 jiwa dan disektor industri sebanyak 18 jiwa. Selain itu juga, Masyarakat Desa Sanenrejo ada yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebanyak 48 jiwa. Mata pencaharian yang termasuk lain-lain sebesar 3024 jiwa.

4.3 Keadaan Pemerintahan Desa Sanenrejo

4.3.2 Lembaga Pemerintahan Desa Sanenrejo

Lembaga pemerintahan merupakan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan pemerintahan di Desa Sanenrejo. Kegiatan pemerintahan di Desa Sanenrejo dipimpin oleh kepala desa dengan di bantu perangkat-perangkat desa lainnya. Selain aparatur desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa atau sering disingkat BPD yang bertugas sebagai pendampingan kegiatan

pemerintahan yang bijaksana. Dibawah ini adalah Tabel lembaga pemerintahan yang terdapat di Desa Sanenrejo.

Tabel 4.11 Lembaga Pemerintahan Desa Sanenrejo

No.	Pemerintah Desa	Keterangan
1.	Dasar hukum pembentukan pemerintah desa	Ada/ tidak (Peraturan Daerah)
2.	Jumlah aparat pemerintahan desa	11 orang
3.	Jumlah perangkat desa	11 unit kerja
4.	Kepala desa	Ada/ tidak
5.	Sekretaris desa	Ada/ tidak
6.	Kepala seksi pemerintahan	Ada/ tidak – Aktif/ tidak
7.	Kepala seksi pembangunan	Ada/ tidak – Aktif/ tidak
8.	Kepala seksi kesejahteraan masyarakat	Ada/ tidak – Aktif/ tidak
9.	Kepala seksi umum	Ada/ tidak – Aktif/ tidak
10.	Kepala seksi keuangan	Ada/ tidak – Aktif/ tidak
11.	Kepala seksi keamanan	Ada/ tidak – Aktif/ tidak
12.	Kepala seksi pamong tani	Ada/ tidak – Aktif/ tidak
13.	Jumlah RW di Desa	6 RW
No.	Badan Permusyawaratan Desa	
1.	Keberadaan BPD	Ada/ tidak – Aktif/ tidak
2.	Jumlah anggota BPD	11 orang

Sumber : Profil Desa Sanenrejo, 2015

Pada Tabel 4.11 dapat dijelaskan dasar pembentukan pemerintahan adalah peraturan dan hukum yang sah yaitu peraturan daerah Kabupaten Jember. Kegiatan pemerintahan di Desa Sanenrejo dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dibantu oleh aparatur desa yang berjumlah 11 orang. Terdapat juga unit kerja, yang berfungsi untuk pembagian fungsi tugas kerja yang jelas.

Unit kerja terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan, kepala seksi kesejahteraan masyarakat, kepala seksi umum, kepala seksi keuangan, kepala seksi keamanan dan kepala seksi pamong tani. RW (rukun warga) yang ada Desa Sanenrejo sejumlah 6. BPD yang berjumlah 11 anggota sangat membantu kegiatan pemerintahan desa sebagai badan yang musyawarah agar kerukunan penduduk tetap terjaga dengan baik.

4.4 Taman Nasional Meru Betiri (TNMB)

Taman Nasional Meru Betiri merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki potensi flora, fauna dan ekosistem serta gejala dan keunikan alam yang dapat dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA). Kawasan Taman Nasional Meru Betiri merupakan hutan hujan tropis dengan formasi hutan bervariasi yang terbagi ke dalam 5 tipe vegetasi yaitu vegetasi hutan pantai, vegetasi hutan mangrove, vegetasi hutan rawa, vegetasi hutan *rheophyte* dan vegetasi hutan hujan dataran rendah. Keadaan hutannya selalu hijau dan terdiri dari jenis pohon yang beraneka ragam serta bercampur jenis bambu yang tersebar di seluruh kawasan ini. Kondisi setiap tipe vegetasi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tipe Vegetasi Hutan Pantai

Formasi vegetasi hutan pantai terdiri dari 2 tipe utama yaitu formasi ubi pantai (*Ipomea pescaprae*), dan formasi *Barringtonia* (25 - 50 m) pada daerah pantai yang landai dan akan berkurang luasnya jika pantainya terjal dan berbatu. Jenis yang paling banyak adalah ubi pantai (*Ipomoea pescaprae*) dan rumput lari (*Spinifex squarrosus*). Formasi *Barringtonia* terdiri dari keben (*Barringtonia asiatica*), nyamplung (*Calophyllum inophyllum*), waru (*Hibiscus tiliaceus*), ketapang (*Terminalia catappa*), pandan (*Pandanus tectorius*) dan lain-lain.

b. Tipe Vegetasi Hutan Mangrove

Vegetasi ini dapat dijumpai di bagian timur Teluk Rajegwesi yang merupakan muara Sungai Lembu dan Karang Tambak, Teluk Meru dan Sukamade merupakan vegetasi hutan yang tumbuh di garis pasang surut. Jenis-jenis yang mendominasi adalah Pedada (*Sonneratia caseolaris*), Tancang (*Bruguiera gymnorhiza*) dan Nipah (*Nypa fructicans*).

c. Tipe Vegetasi Hutan Rawa

Vegetasi ini dapat dijumpai di belakang hutan payau Sukamade. Jenis-jenis yang banyak dijumpai diantaranya mangga hutan (*Mangifera sp*), sawo kecil (*Manilkara kauki*), ingas/rengas (*Gluta renghas*), pulai (*Alstonia scholaris*), kepuh (*Sterculia foetida*), dan *Barringtonia spicata*.

d. Tipe Vegetasi Hutan Rheophyt

Tipe vegetasi ini terdapat pada daerah-daerah yang dibanjiri oleh aliran sungai dan jenis vegetasi yang tumbuh diduga dipengaruhi oleh derasnya arus sungai, seperti lembah Sungai Sukamade, Sungai Sanen, dan Sungai Bandalit. Jenis tanaman yang tumbuh antara lain glagah (*Saccharum spontaneum*), rumput gajah (*Panicum curcurium*) dan beberapa jenis herba berumur pendek serta rumput-rumputan.

e. Tipe Vegetasi Hutan Hujan Tropika Dataran Rendah

Sebagian besar kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri merupakan tipe vegetasi hutan hujan tropika dataran rendah. Pada tipe vegetasi ini juga tumbuh banyak jenis epifit, seperti anggrek dan paku-pakuan serta liana. Jenis tumbuhan yang banyak dijumpai diantaranya jenis walangan (*Pterospermum diversifolium*), winong (*Tetrameles nudiflora*), gondang (*Ficus variegata*), budengan (*Diospyros cauliflora*), pancal kidang (*Aglaia variegata*), rau (*Dracontomelon mangiferum*), glintungan (*Bischoffia javanica*), ledoyo (*Dysoxylum amoroides*), randu agung (*Gossampinus heptaphylla*), nyampuh (*Litsea* sp), bayur (*Pterospermum javanicum*), bungur (*Lagerstromia speciosa*), segawe (*Adenantha microsperma*), aren (*Arenga pinnata*), langsung (*Langsium domesticum*), bendo (*Artocarpus elasticus*), suren (*Toona sureni*), dan durian (*Durio sibethinus*).

Hingga saat ini di kawasan Taman Nasional Meru Betiri telah teridentifikasi flora sebanyak 518 jenis, terdiri 15 jenis yang dilindungi dan 503 jenis yang tidak dilindungi. Contoh jenis yang dilindungi yaitu Balanopora (*Balanophora fungosa*) yaitu tumbuhan parasit yang hidup pada jenis pohon *Ficus* spp. Dan Padmosari/Rafflesia (*Rafflesia zollingeriana*) yang hidupnya tergantung pada tumbuhan inang *Tetrastigma* sp. Selain itu terdapat pula jenis flora sebagai bahan baku obat/jamu tradisional, dimana berdasarkan hasil uji petik di lapangan telah teridentifikasi sebanyak 239 jenis yang dapat dikelompokkan dalam 7 habitus, yaitu bambu, memanjat, herba, liana, perdu, semak dan pohon. Hingga saat ini di kawasan Taman Nasional Meru Betiri telah teridentifikasi fauna sebanyak 217 jenis, terdiri dari 92 jenis yang dilindungi dan 115 jenis yang tidak dilindungi. Jumlah sebanyak itu meliputi 25 jenis mamalia (18 diantaranya

dilindungi), 8 reptilia (6 jenis diantaranya dilindungi), dan 184 jenis burung (68 jenis diantaranya dilindungi).

Beberapa jenis satwa yang terdapat di dalam kawasan Meru Betiri antara lain kijang (*Muntiacus muntjak*), banteng (*Bos javanicus*), macan tutul (*Panthera pardus*), babi hutan (*Sus sp*), rusa (*Cervus timorensis*), kancil (*Tragulus javanicus*), musang luwak (*Phardoxorus hermaprodytus*), kukang (*Nycticebus caoncang*), landak (*Hystrix brachiura*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), kera hitam/lutung budeng (*Trachypithecus auratus*), kera (*Macaca irus*), trenggiling (*Manis javanicus*). Beberapa jenis burung seperti burung elang Jawa (*Spizateus bartelsi*), burung ular bodo (*Spilormis cheela*), burung laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*), burung elang hitam (*Ictinaetus malayensis*), burung elang bondol (*Haliastur indus*), burung elang brontok (*Spizaetus cirrhatus*), burung elang kelabu (*Butastur indicus*), burung sikep madu asia (*Pernis ptilorynchus*), burung kukuk beluk (*Strix leptogrammica*), burung alap-alap capung (*Microhierax fringillarius*), burung merak (*Pavo muticus*), burung rangkong (*Buceros rhinoceros*), serta beberapa jenis burung lainnya. Berdasarkan penelitian H. Bartels dkk di kawasan Meru Betiri terdapat \pm 180 jenis burung.

Obyek wisata di Taman Nasional Meru Betiri yang menarik untuk dikunjungi : Bandalit, Wisata berkano dan berenang, penangkaran rusa (*Cervus timorensis*), Goa Jepang dan habitat *Rafflesia zollingeriana* dapat dinikmati di blok Krecek, dalam kawasan TNMB juga terdapat areal perkebunan Bandalit yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 131/Kpts-II/1998 dan Nomor : 132/Kpts-II/1998 tanggal 23 Pebruari 1998, areal ini dapat dijadikan sebagai tujuan agrowisata. Sukamade Habitat penyu bertelur, wisatawan dapat menyaksikan secara langsung aktifitas penyu naik ke pantai, bertelur maupun hanya sekadar memeti, di tempat ini juga terdapat penetasan semi alami untuk menetas telur-telur penyu kemudian tukik yang menetas dilepasliarkan kembali ke laut.

4.5 Zonasi Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) yang dikenal sebagai hutan tropis dataran rendah di Propinsi Jawa Timur bagian selatan, tepatnya di daerah jember bagian timur dan banyuwangi bagian barat yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, diantaranya adalah kekayaan flora dengan berbagai jenis tumbuhan yang bermanfaat obat, habitat fauna serta sebagai obyek dan daya tarik wisata alam yang tersebar pada areal seluas 58.000 Ha, dengan luas daratan 57.155 Ha dan perairan 845 Ha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-V/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional, bahwa Taman Nasional Meru Betiri mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan Taman Nasional Meru Betiri dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Taman Nasional Meru Betiri dalam melaksanakan pengelolaan terhadap kawasannya agar berfungsi secara optimal dikelola dengan sistem zonasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.101/IV-SET/2011 tanggal 20 Mei 2011 Zonasi Taman Nasional Meru Betiri seluas 55.845 Ha dengan pembagian zonasi sebagai berikut :

a. Zona Inti seluas 28.707,7 Ha

Zona inti terletak di bagian timur dan sebagian bagian barat kawasan Taman Nasional Meru Betiri; dimana pada zona ini mutlak dilindungi, di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini hanya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian.

b. Zona Rimba seluas 20.897,2 Ha

Zona rimba tersebar mengelilingi zona inti, namun sebagian besar terletak di bagian barat laut dan sebagian kecil terletak di bagian selatan kawasan Taman Nasional Meru Betiri, dimana pada zona ini dapat dilakukan kegiatan sebagaimana kegiatan pada zona inti dan kegiatan wisata alam yang terbatas.

c. Zona Perlindungan Bahari seluas 2.603 Ha

Zona Perlindungan Bahari merupakan zona rimba yang berada di wilayah perairan laut memanjang di sebelah selatan Resort Wonoasri hingga Resort Rajegwesi.

d. Zona Pemanfaatan seluas 273,3 Ha

Zona pemanfaatan terletak pada empat lokasi terpisah, yaitu di Pantai Nanggalan, Pantai Bandalit, Pantai Sukamade, dan Pantai Rajegwesi kawasan Taman Nasional Meru Betiri, dimana pada zona ini dapat dilakukan kegiatan sebagaimana pada zona inti dan zona rimba, dan diperuntukkan bagi pusat pembangunan sarana/prasarana dalam rangka pengembangan kepariwisataan alam dan rekreasi.

d. Zona Rehabilitasi seluas 2.733,5 Ha

Zona rehabilitasi terletak di dua lokasi terpisah, disebelah barat dan sebagian kecil bagian tenggara kawasan Taman Nasional Meru Betiri, dimana pada zona ini dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan yang sudah rusak akibat perambahan.

e. Zona Tradisional seluas 285,3 Ha

Zona tradisional secara sporadik di bagian barat kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Zona ini merupakan bagian taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahannya mempunyai ketergantungan dengan sumberdaya alam.

f. Zona Khusus seluas 345 Ha

Zona khusus terletak di sebelah tenggara (Rajegwesi) dan sebagian kecil di sebelah barat laut (Bandalit). Zona ini adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Dampak sosial Masyarakat Desa Sanenrejo dengan adanya Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat dikatakan cukup baik, dimana pada indikator komitmen masyarakat seluruh atributnya berada pada frekuensi skor 3 (tiga) yang memiliki nilai “Cukup/ Cukup Baik”. Pada indikator interaksi masyarakat, atribut gotong royong berada pada frekuensi skor 3 (tiga) yang memiliki nilai “Cukup/ Cukup Baik”, sedangkan atribut hubungan masyarakat dengan pihak TNMB dan keharmonisan hubungan antar masyarakat Desa Sanenrejo berada frekuensi skor 4 (empat) yang memiliki nilai “Baik”.
2. Dampak ekonomi Masyarakat Desa Sanenrejo dengan adanya Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat dikatakan cukup baik. Dimana pada indikator pendapatan, peningkatan pendapatan Masyarakat Desa Sanenrejo berada pada frekuensi skor 4 (empat) yang memiliki nilai “Baik”, sedangkan tingkat konsumsi Masyarakat Desa Sanenrejo berada pada frekuensi skor 3 (tiga) yang memiliki nilai “cukup/ Cukup Baik”. Pada indikator lapangan kerja , penyerapan tenaga kerja dalam program rehabilitasi berada pada frekuensi skor 3 (tiga) yang memiliki nilai “Cukup/ Cukup Baik”, sedangkan peluang lapangan kerja baru berada pada frekuensi skor 4 (empat) yang memiliki nilai “Baik”.
3. Tingkat keberhasilan Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri melalui evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) secara keseluruhan berhasil. Pada masing-masing tahapan, evaluasi konteks (*context*), evaluasi masukan (*input*), evaluasi proses (*process*), evaluasi produk (*product*) berada pada frekuensi skor 3 (tiga) yang memiliki nilai “Cukup/ Cukup Baik”.

6.2 Saran

1. Sosialisasi program rehabilitasi oleh pihak TNMB pada masyarakat perlu ditingkatkan lagi, sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan aturan.
2. Pihak Balai Taman Nasional Meru Betiri sebaiknya memberikan jenis tanaman pokok yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi lagi, supaya pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih tinggi daripada sekarang.
3. Pada tahapan evaluasi konteks (*context*), pemenuhan kebutuhan dalam program rehabilitasi pemenuhan bibit perlu ditingkatkan lagi. Pada tahapan evaluasi masukan (*Input*), perlu adanya keterbukaan mengenai anggaran dana program rehabilitasi oleh pihak taman nasional. Pada tahapan evaluasi proses (*process*), penyuluhan program rehabilitasi perlu lebih diintensifkan lagi. Pada tahapan produk (*product*), pihak taman nasional perlu untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program rehabilitasi agar tujuan utama diadakannya program rehabilitasi cepat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra K. 2013. *Pola Kemitraan Petani Dengan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Dan Kontribusi Kegiatan Usahatani Di Zona Rehabilitasi Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Jember.
- Arifin S. 2013. *Partisipasi Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi Di Desa Curahnongko Resort Andongrejo Dalam Program Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri*. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Jember.
- Balai Taman Nasional Meru Betiri. 2004. *Rancangan Teknis Rehabilitasi Kawasan Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2004*. Departemen Kehutanan. Jember.
- Balai Taman Nasional Meru Betiri. 2013. *Taman Nasional Meru Betiri*. <http://merubetiri.com/>. [Diakses pada Desember 2015].
- Danil M. 2013. *Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*. Jurnal. Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen [Vol.IV No.7]. Aceh.
- Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya.
- Depnakertrans. 2004. *Penanggulangan Pengangguran di Indonesia*. Majalah Nakertrans Edisi-03 TH. XXIV- Juni.
- Diah A, Boedi H, Kismartini. 2013. *Pengaruh Rehabilitasi Mangrove Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Fahrudin, Adi. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Gabriela H. K. 2014. *Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Haque N. H. 2014. *Modal Sosial Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus di Desa Curahnongko Resort Andongrejo Jember)*. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Jember.

- Harnanto, S. 2003. *Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Kabupaten Gunungkidul (Kasus di Pantai Baron dan Sadeng)*. Tidak Diterbitkan. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Indriyanto. 2008. *Ekologi Hutan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jurianto, A. 2013. *Dampak Sosial Ekonomi Dan Budaya Akibat Perubahan Mata Pencaharian Dari Nelayan Ke Penambang*. SKRIPSI. Fakultas Pertanian Universitas Jember. Jember.
- Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Desa Sanenrejo. 2015. *Profil dan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember*. Jember.
- Pratama, D. 2014. *Evaluasi Program Terhadap Manajemen Perpustakaan Sekolah Menggunakan Model CIPP*. Teknologi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Purwaningsih, E. 2006. *Studi Pemanfaatan Kegiatan Rehabilitasi Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dan Gangguan Terhadap Kawasan Taman Nasional Meru Betiri*. Skripsi. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Sari B. F. *Bentuk Kerjasama (Cooperation) pada interaksi sosial waria*. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- Sitinjak, Robert, 2000, *Strategi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Analisis SWOT dan AHP*. Universitas Indonesia.
- Soemardjan, S. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Subaktini, Dewi. 2006. *Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Di Zona Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri, Jember, Jawa Timur*. Surakarta: BP2TP DAS.
- Suryabrata, Sumat. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Taman Nasional Meru Betiri. 2012. *Master Plan Program Rehabilitasi*. Balai Taman Nasional Meru Betiri.

Tiorita, H. 2012. *Rehabilitasi Lahan Kritis Dengan Sistem Agroforestry*. <http://uwityangyoyo.wordpress.com/2012/09/02/rehabilitasi-lahan-kritis-dengan-sistem-agroforestry-oleh-helen-tiorita/>. [Diakses pada Desember 2015].

Wahono. 2002. *Budidaya Tanaman Jati (Tectona grandis L. F)*. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu, Puttusibau.

